

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**PENYELENGGARAAN INOVASI DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI  
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau Pekanbaru*



**NAMA : MOH ZULFIE SATRIA  
NPM : 167310128**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S-1) pada Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak yang terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dra. Hj. Monalisa, M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Karyawan-karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Beserta Pegawai yang telah Membantu dalam memberikan data-data dan solusi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada masyarakat di Kecamatan Tualang yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini.
9. Ayahanda terkasih Zulkarnaen dan Ibunda tersayang Zubaidah atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

10. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2016, terimakasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis

Moh Zulfie Satria



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	20
1. Tujuan Penelitian .....	20
2. Kegunaan Penelitian.....	20
<b>BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>21</b>
A. Studi Kepustakaan .....	21
1. Konsep Pemerintahan .....	21
2. Konsep Manajemen Lingkungan .....	24
3. Konsep Lingkungan Hidup .....	27
4. Konsep Ekologi Pemerintahan.....	20
5. Konsep Inovasi.....	31
6. Konsep Inovasi Pemerintahan.....	33
7. Konsep Pengelolaan .....	35
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Pikir .....	38
D. Konsep Operasional .....	39
E. Operasionalisasi Variabel.....	41
F. Teknik Pengukuran .....	42
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Tipe Penelitian .....	47
B. Lokasi penelitian.....	47
C. Populasi dan Sampel .....	48
D. Teknik Penarikan Sampel.....	48
E. Jenis dan Sumber Data.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data .....	49

G. Teknik Analisis Data.....	50
------------------------------	----

**BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ..... 51**

A. Kecamatan Tualang .....	51
1. Letak Geografis Kecamatan Tualang .....	51
2. Pemerintahan .....	51
3. Keadaan Pendudukan .....	52
4. Pendidikan .....	53
5. Kesehatan .....	53
6. Sarana Ibadah.....	54
B. Gambaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.....	55
1. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup.....	55
2. Tugas Dinas Lingkungan Hidup .....	56
3. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup .....	56
4. Susunan Organisasi .....	57

**BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 60**

A. Identitas Responden .....	60
1. Usia .....	60
2. Jenis Kelamin.....	61
3. Pendidikan .....	61
B. Analisis Hasil Penelitian .....	63
1. Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	64
2. Hambatan/kendala Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak .....	80

**BAB VI: PENUTUP..... 82**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

**DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 85**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2020.....	13
I.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Tualang .....	15
I.3	Sarana dan Prasarana di Kecamatan Tualang .....	16
I.4	Sumber Volume Sampah di Kecamatan Tualang .....	17
II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	36
II.2	Operasional Variabel Penelitian Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak .....	42
II.3	Populasi dan Sampel Tentang Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak .....	48
IV.1	Jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tualang .....	52
IV.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Tualang Tahun 2020 .....	53
IV.3	Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Tualang .....	53
IV.4	Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan di Kecamatan Tualang .....	54
IV.5	Jumlah Sarana Ibadah Kecamatan Tualang .....	55
V.1	Distribusi Tingkat Usia Responden .....	60
V.2	Distribusi Jenis Kelamin Responden.....	61
V.3	Distribusi Tingkat Pendidikan Responden .....	62
V.4	Distribusi Tanggapan Responden pada Indikator Inovasi Minimal Telah Berjalan 2 Tahun .....	65
V.5	Distribusi Tanggapan Responden pada Indikator Memiliki Kebaharuan dan Keunikan.....	68
V.6	Distribusi Tanggapan Responden pada Indikator Melibatkan Peran Masyarakat serta <i>stakeholder</i> .....	71
V.7	Distribusi Tanggapan Responden pada Indikator Dibiayai APBD dan atau Pembiayaan yang Sah.....	73
V.8	Distribusi Tanggapan Responden pada Indikator Memberikan Dampak atau Manfaat Bagi Daerah dan Masyarakat.....	76
V.9	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak .....	78

## DAFTAR GAMBAR

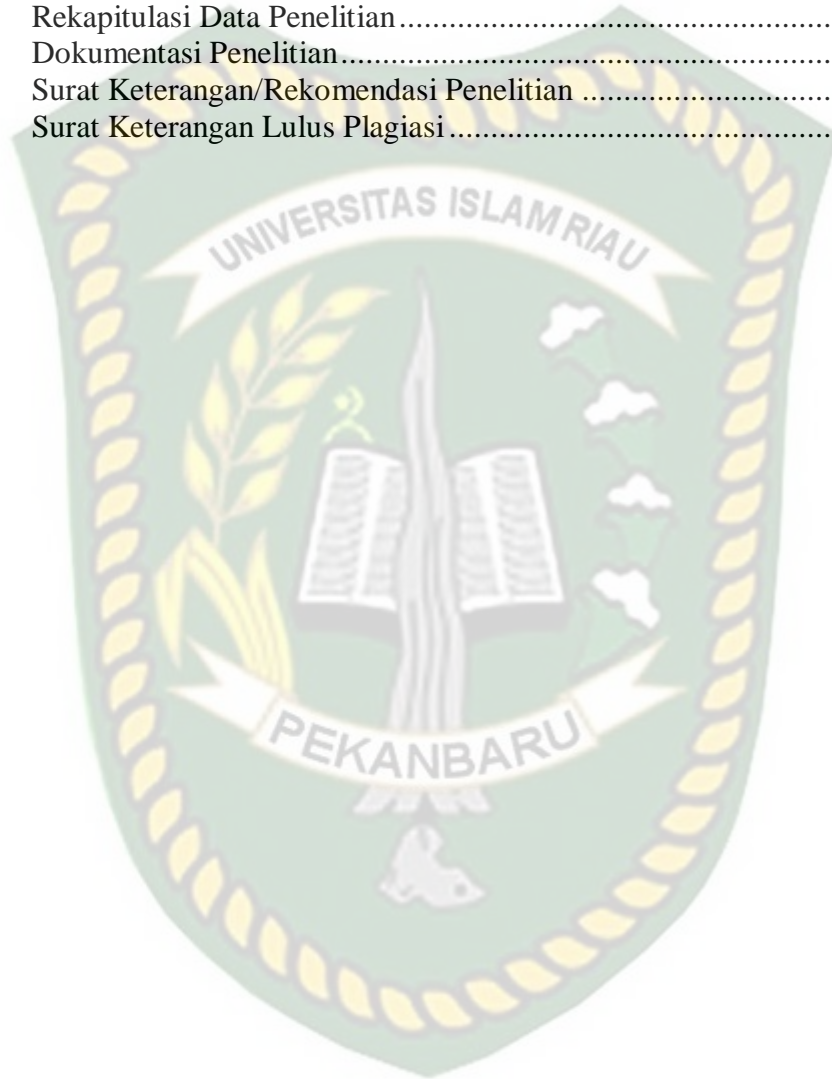
Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Tentang Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak .....	39
IV.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	59





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian .....	87
2. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	92
3. Rekapitulasi Data Penelitian.....	92
4. Dokumentasi Penelitian.....	95
5. Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian .....	102
6. Surat Keterangan Lulus Plagiasi.....	106



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Zulfie Satria  
NPM : 167310128  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
  2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
  3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum RI.
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2021  
Pelaku pernyataan,



**Moh. Zulfie Satria**

## ABSTRAK

### **PENYELENGGARAAN INOVASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

**Oleh:**

**MOH ZULFIE SATRIA  
NPM : 167310128**

Tujuan penelitian untuk mengetahui penyelenggaraan inovasi dan hambatan/kendala Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Tipe penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian adalah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dan Masyarakat Kecamatan Tualang. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga sampel penelitian ini ditetapkan berjumlah 51 orang. Pengambilan data dikumpulkan dengan cara observasi, penyebaran kuesioner, dan dokumentasi. Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian dikelompokkan dan diolah secara kuantitatif. Data tersebut dipresentasikan dan dijelaskan serta dianalisa secara deskriptif guna mendapatkan hasil penelitian, lalu dapat ditarik kesimpulan. Secara keseluruhan penyelenggaraan inovasi dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berada pada kategori cukup terlaksana. Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah melakukan inovasi yang telah berjalan lebih dari 2 tahun, adanya kebaruan dan keunikan dalam pengelolaan sampah dengan cara menggandeng masyarakat, melibatkan peran masyarakat serta stakeholder, dan kegiatan dibiayai oleh APBD dari Kabupaten Siak, kemudian memberi dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan demikian inovasi pengelolaan sampah berada pada kategori cukup terlaksana. Terdapat beberapa hambatan dalam inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang yakni tingkat penyebaran penduduk, partisipasi, pembinaan, penyuluhan, dan sarana prasarana yang dimiliki.

**Kata Kunci:** Inovasi, Pengolahan Sampah, Pemerintah Daerah.



## ABSTRACT

### IMPLEMENTATIO OF INNOVATION IN WASTE MANAGEMENT BY THE ENVIRONMENT SERVICE IN TUALANG DISTRICT SIAK REGENCY

By:

MOH ZULFIE SATRIA  
NPM : 167310128

*The purpose of this research is to find out innovations and barriers to innovation in waste management by the Environmental Service in Tualang District, Siak Regency. This type of research is quantitative with a descriptive approach. The research population is the employees of the Environmental Service of Siak Regency and the Community of Tualang District. Sampling was done by using purposive sampling technique, so that the sample of this study was set at 51 people. Data were collected by means of observation, distributing questionnaires, and documentation. All data that has been obtained in the study are grouped and processed quantitatively. The data are presented and explained and analyzed descriptively in order to obtain research results, then conclusions can be drawn. Overall, innovation in waste management by the Environmental Service in Tualang District, Siak Regency is in the fairly implemented category. The Environmental Service in Tualang District, Siak Regency has made innovations that have been running for more than 2 years, there is a novelty and uniqueness in waste management by cooperating with the community, involving the role of the community and stakeholders, and activities financed by the Regional Budget of Siak Regency, then having an impact or benefits for the region and society. Thus, waste management innovation is in the category of quite implemented. There are several obstacles to waste management innovation in Tualang District, namely the level of population distribution, participation, guidance, counseling, and infrastructure.*

*Keywords: Innovation, Waste Management, Local Government.*



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah dengan kata lain dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara telah memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah.

Tujuan pembentukan negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi utama pemerintahan adalah melakukan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar masyarakat dapat terpuaskan.

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum untuk mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagai satuan pemerintahan Nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi ruang bagi daerah sebagai daerah otonom. Daerah otonom selanjutnya disebut otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan maka Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah dalam rangka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menjalankan otonomi seluas-luasnya,

Adapun urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 9 yaitu :

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagai mana dimaksud pada ayat(1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) menjelaskan Urusan Pemerintahan

Absolut meliputi:

- a) Politik Luar Negeri;
- b) Pertahanan;
- c) Keamanan;
- d) Yustisi;
- e) Moneter dan Fiskal; dan
- f) Agama

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a) Tenaga Kerja;
- b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c) Pangan;
- d) Pertanahan;
- e) **Lingkungan Hidup;**
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Perhubungan;
- j) Komunikasi dan informatika;
- k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) Penanaman modal;
- m) Kepemudaan dan olah raga;
- n) Statistik;
- o) Persandian;
- p) Kebudayaan;
- q) Perpustakaan; dan
- r) Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energy dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.



Berdasarkan uraian di atas, salah satu yang menjadi kewenangan daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu mengenai Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sampah merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup.

Dengan semakin bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat, mengakibatkan semakin banyak timbunan sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat dan merupakan benda yang dapat merusak lingkungan hidup. Pengelolaan sampah sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan hidup, karena sampah dapat berpengaruh negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Keberadaan sampah dapat menyebabkan pencemaran atau polusi, yaitu polusi tanah, polusi udara, maupun polusi air.

Tanah akan dicemari oleh sampah yang tidak dapat terurai atau sampah-sampah yang sulit diurai oleh organisme-organisme dalam tanah, sehingga tanah menjadi kotor, penyerapan air menjadi terganggu, atau dapat menimbulkan genangan air di berbagai tempat yang akhirnya menjadi sarang bagi nyamuk berbahaya, seperti nyamuk demam berdarah dan nyamuk malaria.

Udara yang dicemari oleh sampah diketahui dari aroma bau yang ditimbulkan, bau yang ditimbulkan pertanda terjadinya pembusukan, di mana pembusukan yang terjadi akibat adanya organisme tertentu dan kelembaban tanah

akibat tertimbun sampah. Kondisi tanah yang lembab tersebut menjadi tempat berkembangnya berbagai bibit kuman atau virus yang akhirnya menjadi potensi berbagai penyakit.

Air yang dicemari oleh sampah diketahui dari adanya sampah-sampah yang dibuang ke perairan seperti sungai, kanal, atau drainase-drainase, sehingga air menjadi kotor dan alirannya terganggu. Sampah yang selalu di buang ke drainase menyebabkan tersumbatnya aliran air, dan dapat menyebabkan banjir. Banjir yang terjadi kemudian mengenai manusia, di mana airnya dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit, maupun berbagai penyakit pencernaan akibat kuman yang dibawa oleh air.

Saat ini sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju, sampah selalu menjadi masalah yang ada di lingkungan. Di Indonesia sampah yang dihasilkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari dan proses alam sampai saat ini belum terkelola dengan baik, sehingga sampah menumpuk di mana-mana dan menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah tersebut di perlukan *Innovative Governance* atau pemerintahan yang inovatif dalam pengelolaan sampah sehingga dapat mengatasi permasalahan sampah ini secara optimal. *Innovative Governance* atau pemerintahan inovatif, merupakan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau bisa juga dikatakan sebagai Inovasi Daerah. Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Santoso (2016), Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada mendefinisikan pemerintahan inovatif adalah pemerintahan yang mengondisikan, memfasilitasi dan meregulerkan praktek-praktek inovatif dalam pengelolaan kepentingan publik. Dalam sistem itu, ada elemen pemerintah dan ada juga elemen masyarakat/rakyat/warga negara. Lebih dari itu, sistem digerakkan oleh interaksi antara keduanya. Dengan kata lain, inovasi ini mempertaruhkan kecerdasan atau kreativitas, hanya saja kecerdasan dan kreativitas ini adalah wataknya sistem pemerintahan, bukan sekedar wataknya pimpinan

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam *Innovative Governance Award* Tahun 2017 menetapkan ada 5 indikator pemerintah inovatif, yakni :

1. Inovasi minimal telah berjalan 2 tahun,
2. Memiliki kebaharuan dan keunikan,
3. Melibatkan peran masyarakat serta *stakeholder*,
4. Dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah dan
5. Memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah indikator pemerintahan inovatif ada 8 yaitu, peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas layanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam melakukan inovasi pengelolaan sampah yaitu dengan cara *Ecobrick*. *Ecobrick* merupakan salah satu upaya kreatif untuk mengelola sampah plastik menjadi benda-benda yang berguna, mengurangi pencemaran dan racun yang ditimbulkan oleh sampah plastik. *Ecobrick* adalah salah satu usaha kreatif bagi penanganan sampah plastik. Fungsinya bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan untuk memperpanjang usia plastik-plastik tersebut dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna, yang bisa dipergunakan bagi kepentingan manusia pada umumnya. Pembuatan *ecobrick* masih belum begitu populer di kalangan masyarakat luas. Sebagian besar masyarakat masih memperlakukan plastik-plastik bekas sebagai sampah plastik rumah tangga, mengotori lingkungan, sungai dan mencemari kehidupan sehari-hari tanpa adanya kesadaran diri. bagaimana kita perlu mengubah gaya hidup kita dan perilaku konsumsi kita, dan apa yang bisa kita lakukan dengan plastik atau sampah yang digunakan dan bahkan membuat mereka sebagai bagian dari solusi.

Membuat *ecobrick* tidak sulit, hanya memerlukan ketelatenan dan sedikit usaha. Secara umum langkah-langkah membuat *ecobrick* adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan botol-botol plastik bekas, seperti botol bekas kemasan minuman (misalnya air mineral), botol bekas kemasan minyak goreng dan lain sebagainya. Kemudian mencucinya hingga bersih, lalu dikeringkan.
2. Mengumpulkan berbagai macam kemasan plastik, seperti kemasan mie instan, minuman-minuman instan, plastik pembungkus, tas plastik dan



sebagainya. Harus dipastikan plastik-plastik tersebut bebas dari segala jenis makanan (yang tersisa di dalamnya), dalam keadaan kering dan tidak tercampur oleh bahan lain (klip, benang, kertas dan sebagainya).

3. Memasukkan segala jenis plastik yang ada di poin ke 2 ke dalam botol-botol plastik pada poin ke 1.
4. Tidak boleh tercampur dengan kertas, kaca, logam, benda-benda yang tajam dan bahan-bahan lain selain plastik.
5. Bahan-bahan plastik yang dimasukkan ke dalam botol plastik harus dimampatkan hingga sangat padat dan mengisi seluruh ruangan dalam botol plastiknya.
6. Cara memadatkannya bisa dengan menggunakan alat yang terbuat dari bambu atau kayu (seperti tongkat bambu atau kayu).
7. Jika ingin membuat sesuatu dengan hasil *ecobrick* ini, misalnya membuat meja, kursi, atau benda-benda lain, maka bisa menggunakan botol-botol yang berukuran sama, atau bahkan dari jenis dan merek yang sama, sehingga memudahkan penyusunan.
8. Jika menginginkan hasil yang berwarna-warni, maka plastik-plastik kemasan yang disusun di dalamnya bisa diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan warna sesuai yang diinginkan. Bisa juga dengan cara membungkus botol plastik dengan cellophane/pita perekat yang berwarna.
9. Setelah semua botol plastik diisi dengan kemasan-kemasan plastik hingga padat, maka botol-botol plastik tersebut siap disusun dan digabungkan

menjadi benda lain, seperti meja, kursi, bahkan dinding dan atau lantai panggung, pembatas ruangan dan banyak lagi lainnya. Untuk merekatkan satu botol dengan botol yang lainnya bisa menggunakan lem adesive atau bahan semen/gips. Supaya bisa merekat kuat, botol-botol tersebut diikat kuat-kuat dengan menggunakan tali atau benang. Penggunaan tali rafia akan memberikan efek warna yang bagus sekaligus mengurangi sampah plastik dari jenis lain.

Dalam menjawab permasalahan sampah, pemerintah Kabupaten Siak mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan sampah. Dalam menjalankan kebijakan publik ini sangat di perlukan peran dari masyarakat, karena pengelolaan sampah tidak akan optimal jika tidak didukung oleh peran serta masyarakat.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan sampah, Penyelenggaraan pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan dan asas nilai ekonomi.

Asas-asas penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut dimaksudkan sebagai berikut:

Asas “tanggung jawab” adalah Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan masyarakat serta menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelolaan sampah. Sesuai di dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 di desa/kelurahan atau nama lainnya, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Dalam melakukan pengelolaan sampah, pemerintah juga memberikan insentif bagi pihak-pihak yang dapat melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah, hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan sampah pada pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
  - a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. Pengurangan timbunan sampah; dan/atau
  - d. Tertib penanganan sampah.



(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:

- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Kabupaten Siak saat ini terdiri dari 14 kecamatan yang tersebar di seluruh kawasan dengan total luas 8.556,09 Km<sup>2</sup>. Kecamatan terluas disandang Kerinci Kanan dengan luas wilayah 1.705,00 Km<sup>2</sup> atau 19,93% dari total luas Kabupaten Siak, sedangkan Kecamatan Sabak Auh menjadi kecamatan dengan wilayah terkecil yakni 73,38 Km<sup>2</sup> atau 0,86% dari total luas Kabupaten Siak. Saat ini Kabupaten Siak dihuni sebanyak 457.940 jiwa yang terdiri dari 236.494 laki-laki dan 221.446 perempuan dengan tingkat kepadatan rata-rata 51 orang perKm<sup>2</sup>.

**Tabel I.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk	
		Km <sup>2</sup>	Persentase	Jumlah	Kepadatan
1	Minas	346,35	4,05	28.948	80
2	Sungai Mandau	1.493,65	17,46	9.128	6
3	Kandis	894,17	10,45	74.727	77
4	Siak	1.346,33	15,74	31.144	22
5	Kerinci Kanan	1.705,00	19,93	23.783	13
6	Tualang	128,66	1,50	120.655	879
7	Dayun	155,09	1,81	30.959	193
8	Lubuk Dalam	343,60	4,02	19.905	56
9	Koto Gasib	704,70	8,24	23.469	32
10	Mempura	232,24	2,71	16.951	69
11	Sungai Apit	151,00	1,76	30.997	196
12	Bunga Raya	437,45	5,11	26.777	59
13	Sabak Auh	73,38	0,86	12.911	172
14	Pusako	544,47	6,36	7.586	14
Jumlah		8,556,09	100	457.940	51

Sumber: BPS Kabupaten Siak, 2020.

Kecamatan Tualang merupakan salah satu kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Siak untuk penanganan sampah langsung ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dan setiap Kecamatan masing-masing memiliki pengawas kebersihan.

Masalah sampah yang timbul di Kecamatan Tualang adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, limbah industri maupun sampah kantor. Sulitnya penanganan sampah erat kaitannya dengan buruknya kondisi pemukiman penduduk masyarakat, karena pertumbuhan pemukiman yang tidak teratur akan mempersulit proses pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga akhirnya menumpuknya sampah. Hampir rata-rata masyarakat perairan Sungai Siak sampah yang dihasilkan dari rumah tangga dibuang ke sungai atau ke lahan yang kosong. Namun pada kenyataannya, penanganan sampah-sampah yang berada di Kecamatan Tualang saat ini belum teratur. Hal itu juga disebabkan karena keterbatasan alat pengangkutan sampah ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan kurang memadai mengingat jarak menuju ke TPA yang cukup jauh.

Dari permasalahan yang ada di atas tidak terlepasnya dari peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam menangani permasalahan sampah yang ada. Sementara dilihat dari hasil jumlah penduduk Kecamatan Tualang dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Tualang**

No	Kampung	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga
1	Maredan	3.426	847
2	Tualang	15.724	3.171
3	Pinang Sebatang	4.656	2.330
4	Maredan Barat	2.814	803
5	Pinang Sebatang Barat	5.237	1.516
6	Pinang Sebatang Timur	9.413	2.984
7	Perawang Barat	23.246	4.759
8	Perawang	43.843	11.957
9	Tualang Timur	5.825	1.559
	Total	114.194	30.036

Sumber : Kantor Kecamatan Tualang Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat terlihat jumlah penduduk Kecamatan Tualang cukup banyak. Hal ini juga berimbas dengan jumlah sampah yang ikut meningkat, padahal lahan TPA di Kabupaten Siak tidak ikut bertambah. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak untuk mengukur jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat, Kecamatan Tualang memakai asumsi karena belum memiliki alat ukur yang pasti. Asumsi tersebut memperkirakan bahwa satu orang penduduk menghasilkan 2,5 Liter Sampah Setiap harinya.

Salah satu wilayah Kecamatan Tualang adalah Kelurahan Perawang. Kelurahan Perawang merupakan satu-satunya Kelurahan yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dan selebihnya di Kecamatan Tualang itu daerahnya berstatuskan Desa. Dengan tugas menjalankan roda pemerintahan tingkat Kelurahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kecamatan Tualang serta Pemerintah Kabupaten Siak. Keberadaan Kelurahan Perawang saat ini dipimpin oleh seorang Lurah dibantu oleh beberapa aparat kelurahan yang terdiri dari Sekretaris Lurah,

Bendahara Lurah, Kepala Bidang, Ketua Lingkungan, Ketua RW, Ketua RT. Adapun Kelurahan Perawang ini terdiri dari 3 Lingkungan, 8 RW dan 91 RT. Saat ini pada akhir tahun 2020 Kelurahan Perawang dihuni oleh 43.843 jiwa penduduk yang terbagi pada laki-laki 22.671 jiwa dan perempuan 21.172 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 11.957.

Kecamatan Tualang terdiri dari 9 (Sembilan) Kampung yang masih dalam tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana juga sangat mempengaruhi kinerjanya, yang mana alat pengangkutan sampah yang digunakan harus bergiliran dengan beberapa Kampung dalam satu kecamatan. Seperti di Kecamatan Tualang yang hanya di fasilitasi sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 1.3 : Sarana dan Prasarana di Kecamatan Tualang**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah yang disediakan	Keterangan Kondisi
1	Pick up	2 Unit	Cukup Baik
2	Gerobak Sampah	2 Buah	Baik
3	Tong Sampah	20 Buah	Cukup Baik

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Kabupaten Siak Tahun 2020*

Dijelaskan bahwa sarana prasarana yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak masih sangat terbatas dan kurang terpenuhi karena dengan jumlah armada tersebut harus dibagi dengan 9 (Sembilan) Kampung. Adapun Sarana dan Prasarana seperti Pick Up masih cukup baik hal itu dikarenakan pick up yang ada masih bisa digunakan walaupun sudah tidak layak pakai, adapun Gerobak sampah masih dalam kondisi baik, sedangkan Tong Sampah Masih cukup baik. Hal ini juga sangat berpengaruh dalam waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang cukup lama. Sehingga volume



sampah menumpuk di TPS. Selain itu, kondisi tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah ke tempatnya yang cukup rendah maka situasi masalah penanganan sampah di Kecamatan Tualang menjadi kompleks dan membutuhkan penanganan yang lebih serius sehingga tidak merugikan masyarakat ke depannya.

Sementara volume sampah dari tahun ke tahun terus meningkat karena sampah rumah tangga merupakan penghasil sampah terbesar di antara sampah-sampah lainnya. Berikut adalah data volume sumber sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak:

**Tabel 1.4 : Sumber Volume Sampah di Kecamatan Tualang**

No	Tahun	Sumber Sampah	Volume Sampah	Pengangkutan / Hari		Persentase (%)
				Terangkut	Tidak Terangkut	
1	2017	- Rumah Tangga	80,55 m <sup>3</sup> /hari	35,55 m <sup>3</sup> /hari	45 m <sup>3</sup> /hari	28,63
		- Pasar	60,50 m <sup>3</sup> /hari	25,30 m <sup>3</sup> /hari	35,20 m <sup>3</sup> /hari	15,30
		- Perdagangan	50,50 m <sup>3</sup> /hari	20,50 m <sup>3</sup> /hari	30 m <sup>3</sup> /hari	10,35
		- Perkantoran	25,50 m <sup>3</sup> /hari	10,50 m <sup>3</sup> /hari	15 m <sup>3</sup> /hari	2,67
		- Puskesmas	42,96 m <sup>3</sup> /hari	20,50 m <sup>3</sup> /hari	22,46 m <sup>3</sup> /hari	10,24
2	2018	- Rumah Tangga	96,65 m <sup>3</sup> /hari	40,55 m <sup>3</sup> /hari	56,01 m <sup>3</sup> /hari	39,19
		- Pasar	70,45 m <sup>3</sup> /hari	30,50 m <sup>3</sup> /hari	39,95 m <sup>3</sup> /hari	21,48
		- Perdagangan	60,10 m <sup>3</sup> /hari	30,50 m <sup>3</sup> /hari	29,06 m <sup>3</sup> /hari	18,33
		- Perkantoran	35,10 m <sup>3</sup> /hari	25,50 m <sup>3</sup> /hari	19,06 m <sup>3</sup> /hari	8,95
		- Puskesmas	45,60 m <sup>3</sup> /hari	20,50 m <sup>3</sup> /hari	25,01 m <sup>3</sup> /hari	9,34
3	2019	- Rumah Tangga	120,85 m <sup>3</sup> /hari	58,03 m <sup>3</sup> /hari	62,82 m <sup>3</sup> /hari	70,12
		- Pasar	96,50 m <sup>3</sup> /hari	45,50 m <sup>3</sup> /hari	51 m <sup>3</sup> /hari	43,90
		- Perdagangan	70,40 m <sup>3</sup> /hari	35,50 m <sup>3</sup> /hari	34,09 m <sup>3</sup> /hari	24,99
		- Perkantoran	40,50 m <sup>3</sup> /hari	25,50 m <sup>3</sup> /hari	15 m <sup>3</sup> /hari	10,32
		- Puskesmas	50,10 m <sup>3</sup> /hari	24,98 m <sup>3</sup> /hari	25,12 m <sup>3</sup> /hari	12,51
4	2020	- Rumah Tangga	139,26 m <sup>3</sup> /hari	72,10 m <sup>3</sup> /hari	67,16 m <sup>3</sup> /hari	51,77
		- Pasar	92,30 m <sup>3</sup> /hari	40,50 m <sup>3</sup> /hari	51,80 m <sup>3</sup> /hari	43,88
		- Perdagangan	60,20 m <sup>3</sup> /hari	37,20 m <sup>3</sup> /hari	23,00 m <sup>3</sup> /hari	61,79
		- Perkantoran	38,80 m <sup>3</sup> /hari	24,60 m <sup>3</sup> /hari	14,20 m <sup>3</sup> /hari	63,40
		- Puskesmas	55,20 m <sup>3</sup> /hari	26,80 m <sup>3</sup> /hari	28,40 m <sup>3</sup> /hari	48,55

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2020

Data volume sampah di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang ditampilkan pada tabel di atas memberikan gambaran bahwa dari tahun 2017 sampai 2020 volume sampah terbesar berasal dari hasil aktivitas rumah tangga

dan diikuti oleh sampah yang dihasilkan dari aktivitas pasar. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia cukup besar, sehingga membutuhkan pengelolaan yang efektif dalam menangani masalah sampah ini. Di mana berbagai persoalan timbul akibat adanya sampah mulai dari penumpukan sampah yang merusak pemandangan, bau busuk, dan lingkungan yang kotor. Untuk itu dibutuhkan inovasi yang terus menerus sebagai solusi terbaik dalam mengelola sampah yang ada, sehingga kehadiran sampah bisa bernilai positif bagi lingkungan.

Berdasarkan uraian yang peneliti jelaskan di atas, peneliti menemukan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu :

1. Telah adanya inovasi *ecobrick* dalam pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Siak. Namun inovasi ini belum diterapkan di Kecamatan Tualang.
2. Telah ada inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang dengan membuat Bank Sampah yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat di sekitar tempat penampungan akhir sampah. Adanya penghargaan yang diterima Kecamatan Tualang dalam inovasi pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Namun inovasi ini masih terbatas hanya berada di Kelurahan Perawang, sementara di desa/kelurahan lain belum berkembang
3. Terindikasi belum adanya penyuluhan dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat di Kecamatan Tualang mengenai inovasi pengelolaan sampah, sehingga hanya ada 1 buah Bank Sampah yang terkelola.

4. Luasnya wilayah dan menyebarkan penduduk menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang.
5. Terindikasi masih kurangnya sarana prasarana pengangkutan sampah dan tempat penampungan sampah.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang penulis temukan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut yang nantinya akan diwujudkan dalam sebuah karya ilmiah berupa Proposal dengan judul: **“Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Pemerintah sebagai instansi yang mempunyai fungsi pengaturan yaitu menyusun serta melaksanakan peraturan yang mana tujuan dari pembuatan peraturan tersebut ialah menyelesaikan permasalahan yang terdapat di masyarakat. Khususnya di Kabupaten Siak yang mana pengelolaan sampah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang penulis kemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok usulan penelitian ini yaitu : Bagaimanakah Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui hambatan/kendala Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan Ilmu Pemerintahan di masa yang akan datang seiring perkembangan masyarakat yang semakin maju, kritis, dinamis dalam berbagai aspek, termasuk perpolitikan.
- b. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak agar melakukan perbaikan di masa depannya.
- c. Dan memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini sangat diperlukan landasan teori serta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pemerintah, kebijakan, dan Inovasi Pengolahan sampah yang nantinya menjadi acuan dari penelitian ini sehingga diharapkan tidak keluar dari kerangka dan tujuan penelitian.

##### 1. Konsep Pemerintahan

Menurut Awang dan Wijaya (2012:6) mendefinisikan bahwa pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara, pemerintah adalah organ yang berwenang dan memproses pelayanan publik, baik warga negara asing maupun siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah di wilayah Indonesia.

Menurut D. G. A. Van Poelje dalam Syafiie (2010;21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin sebaik-baiknya. Menurut H. A. Brasz dalam Syafiie (2010;21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum.

Kemudian menurut Ndraha (2003;7) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap

orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut R. Mac Iver dalam Syafiie (2010;22) pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Menurut Wilson dalam Syafiie (2010;23) pemerintahan adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Menurut Apter dalam Syafiie (2010;23) pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut Rasyid dalam Labolo (2006;33) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi menurut Syafiie (2007;15) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua pihak unsur yang di perintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.

- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Ndraha (2010;6) pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Menurut Apter, pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan (dalam Syafiie, 2005;21).

Sedangkan menurut Ndraha (2003;5) pemerintah adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Kemudian menurut Syafiie (2011;4) pemerintah adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal atau pun hal ikhwal pemerintah itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 (empat) unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat.
- b. Yang pertama pihak yang memerintah di sebut penguasa atau pemerintah.
- c. Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat.
- d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan.

Munaf (2014) mengatakan bagaimana pemerintahan dikelola dan diselenggarakan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik

semata, namun legalitas tindakan dan perbuatan pemerintahan memiliki relevansi terhadap hukum yang berlaku.

## 2. Konsep Manajemen Lingkungan

Manajemen pada intinya adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu (Musselman dan Jackson, 1992).

Lingkungan menurut definisi umum yaitu segala hal di sekeliling kita yang terkait kepadanya secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang hidup dan kegiatan kita berhubungan dengannya dan bergantung padanya (Ananichef, 1976 dalam Notohadiprawiro, 2006).

Elemen lingkungan adalah hal-hal yang terkait dengan tanah, udara, air, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan hubungan antar faktor-faktor tersebut. Titik sentral isu lingkungan adalah manusia. Jadi manajemen lingkungan bisa diartikan sekumpulan aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan (Purwanto, 2004).

Menurut Strum (1998) dalam Purwanto (2004) manajemen lingkungan merupakan sebuah aspek dari keseluruhan fungsi manajemen yang menentukan dan mengarah pada implementasi kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Manajemen lingkungan berada dalam kondisi terpecah-pecah dan tidak memiliki standar tertentu sebelum adanya ISO 14001 dan secara internasional berbeda penerapannya antara negara satu dengan lain. Praktek manajemen lingkungan



yang dilakukan secara sistematis, prosedural dan dapat diulang disebut dengan *Environmental Management System (EMS)*.

Menurut ISO 14001 (1996) dalam Purwanto (2004: 2) sistem manajemen lingkungan (EMS) adalah: *“That part of the overall management system which includes organizational structure planning, activities, responsibilities, practices, procedures, processes, and resources for developing, implementing, achieving, reviewing, and maintaining the environmental policy.”*

Kutipan di atas menjelaskan bahwa EMS adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang berfungsi menjaga dan mencapai sasaran kebijakan lingkungan. Sehingga EMS memiliki elemen kunci yaitu pernyataan kebijakan lingkungan dan merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang lebih luas.

#### A. Cakupan Manajemen Lingkungan

Menurut Purwanto (2004) terdapat pendapat yang membagi manajemen lingkungan ke dalam dua cakupan, yaitu:

- a. Lingkungan internal.
- b. Lingkungan eksternal.

Lingkungan internal dapat memengaruhi aktivitas suatu organisasi secara langsung. Menurut Suyanto (2009) hasil dari analisis lingkungan internal akan menghasilkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Kekuatan atau keunggulan perusahaan itu meliputi keunggulan pemasaran, keunggulan sumber daya manusia, keunggulan keuangan, keunggulan operasi dan keunggulan organisasi

dan manajemen. Lingkungan internal meliputi: pemilik (owners), dewan direksi, karyawan dan lingkungan kerja fisik.

Menurut Handoko (2000), lingkungan eksternal merupakan unsur-unsur yang berasal dari luar organisasi, di mana unsur-unsur ini sulit untuk dikendalikan dan diketahui lebih awal oleh manajer. Komponen yang termasuk ke dalam lingkungan eksternal adalah segala hal yang dapat menimbulkan dampak pada lingkungan di sekitar organisasi, termasuk masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, dan pihak yang mewakilinya (pemerintah, pelanggan, investor/pemilik). Aktivitas yang terkait yaitu komunikasi dan hubungan dengan masyarakat, usaha-usaha penanganan pembuangan limbah ke saluran umum, perhatian pada keseimbangan ekologis dan ekosistem di sekitar pabrik dan lain-lain.

Nilasari dan Wiludjeng (2006) menjelaskan bahwa lingkungan eksternal dibagi menjadi dua yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen, sedangkan lingkungan eksternal makro adalah lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung, seperti kondisi perekonomian, perubahan teknologi, politik, sosial dan lain-lain.

#### B. Orientasi Kebijakan Manajemen Lingkungan

Manajemen lingkungan menurut orientasi kebijakannya secara umum dapat dibagi dua, yaitu (Marcus & Willig, 1997):

- a. Berorientasi pemenuhan (*regulation compliance*).
- b. Berorientasi setelah pemenuhan (*beyond compliance*).

Menurut Purwanto (2004), kebijakan manajemen lingkungan berorientasi pemenuhan merupakan awal pemikiran manajemen lingkungan di perusahaan. Kebijakan ini berasal dari pemikiran bahwa akibat yang ditimbulkan aktivitas perusahaan tidak boleh sampai merugikan keberlangsungan bisnis perusahaan, caranya dengan menaati peraturan pemerintah semaksimal mungkin untuk menghindari penalti/denda lingkungan, klaim dari masyarakat sekitar dan lain-lain, contohnya dengan memakai metode reaktif, ad-hoc, dan pendekatan end-of-pipe (menanggulangi masalah polusi dan limbah pada hasil akhirnya, seperti lewat penyaring udara, teknologi pengolah air limbah dan lain-lain). Sedangkan kebijakan manajemen lingkungan berorientasi setelah pemenuhan berangkat dari pemikiran bahwa cara tradisional menangani isu lingkungan – dalam cara reaktif, adhoc, pendekatan end-of-pipe- telah terbukti tidak efisien.

### **3. Konsep Lingkungan Hidup**

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia (Salim, 1660:32)

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan tuhan yang maha kuasa di bumi ini. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan yang sangat menentukan.

Namun demikian, baik lingkungan fisik, biologis, maupun lingkungan sosial selalu mengalami perubahan-perubahan, agar lingkungan tersebut dapat

mempertahankan kehidupannya secara serasi, maka manusia perlu melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu di tentukan oleh bermacam-macam faktor yaitu:

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut.
2. Hubungan interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu.
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup.
4. Faktor nonmaterial yaitu, keadaan suhu, cahaya, energi, dan kebisingan.

Menurut Keraf (2002) lingkungan hidup sebagian besar bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri.

Kehidupan manusia sangat tergantung kepada keadaan lingkungan hidup, daya lingkungan yaitu kemampuan alam dalam mendukung kehidupan manusia harus di jaga senantiasa dapat memberikan dukungan maksimum kepada kehidupan manusia.

Menurut Rangkuti (2000:171) mengatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di lihat dari sudut pandang bentuk dan isinya, di imbangi keharusan bagi pemerintah untuk mengaksikan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong di tingkatannya upaya melestarikan lingkungan.

Wewenang pemerintah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di antaranya:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.



2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika.
3. Mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subjek hukum lainnya serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan.
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Konsep Ekologi Pemerintahan

Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *oikos* (lingkungan) dan *logos* (ilmu). Secara tipologi, ekologi dibedakan atas darat, laut, dan udara. Sedangkan secara jenis, ekologi dibagi atas alami dan buatan.

Menurut edwar S. Rogers dalam bukunya *human ecology and health, an introduction for administration*. Hang diterbitkan Mac Millan, New york disebutkan bahwa: "*Ecology is the studi of the relations between organism and their emvironment*" ekologi adalah pelajaran tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar mereka.

Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi negara, maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, dan dengan masyarakatnya.

Dalam Ekologi Pemerintahan, ada dua macam Ekosistem yaitu :

## 1. Ekosistem/lingkungan Fisik

Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah Negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan Fisik dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok yaitu : kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam.

## 2. Ekosistem/lingkungan sosial atau geografis

Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia.

Ada 4 prinsip dasar Ekologi Pemerintahan menurut Amsyari, yaitu :

- a. Setiap masalah akan menimbulkan stimulus negatif terhadap sistem yang akan menghancurkan eksistensi manusia.
- b. Perlunya tindakan adaptasi yang menyeluruh dan mengarah kepada suatu perbaikan ekosistem agar menjadi lebih stabil dan harmonis.
- c. Serta bebas dari ancaman stimulus negatif yang sama untuk di masa yang akan datang. Apabila tindakan adaptasi yang dilakukan merupakan satu stimulus negatif yang baru bagi organisme lain, maka segala usaha harus mendahulukan kepentingan populasi manusianya dibanding kepentingan populasi lainnya.
- d. Tindakan adaptasi apapun yang dilakukan harus berorientasi pada pemikiran untuk kemanfaatan yang sebesar mungkin untuk kepentingan eksistensi manusia

## 5. Konsep Inovasi

Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012:132), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.

Menurut Yogi dalam LAN (2007:115), inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri sangat beragam dan dari banyak perspektif. Menurut Rogers dalam LAN (2007:115) menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Sedangkan menurut Damanpour bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produk yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.

Menurut Rogers dalam LAN (2007:116) mengatakan bahwa inovasi mempunyai atribut sebagai berikut:

### 1. Keuntungan Relatif

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

## 2. Kesesuaian

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

## 3. Kerumitan

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

## 4. Kemungkinan Dicoba

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, di mana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

## 5. Kemudahan diamati

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.



Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya berupa hasil pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga diimplementasikan agar dirasakan manfaatnya. Inovasi erat kaitannya teknologi dan informasi, sehingga perkembangannya dapat dipelajari dan mudah diperoleh informasinya.

## **6. Konsep Inovasi Pemerintahan**

Santoso (2016) mengatakan pemerintahan inovatif adalah pemerintahan yang mengondisikan, memfasilitasi dan meregulerkan praktek-praktek inovatif dalam pengelolaan kepentingan publik. Dalam sistem itu, ada elemen pemerintah dan ada juga elemen masyarakat/rakyat/warga negara. Lebih dari itu, sistem digerakkan oleh interaksi antara keduanya. Dengan kata lain, inovasi ini mempertaruhkan kecerdasan atau kreativitas, hanya saja kecerdasan dan kreativitas ini adalah wataknya sistem pemerintahan, bukan sekedar wataknya pimpinan.

Selain itu hasil benchmarking teoritis dari Global Innovation Index dan Government Innovation Index di Korea Selatan (LAN, 2016 : 42) bahwa pemerintah bisa dikatakan inovatif merupakan pemerintah yang memiliki input 10 indikator pemerintah inovatif dan 20 indikator output. Adapun 10 indikator tersebut yaitu visi inovasi, komitmen perubahan, reward bagi inovator, kebijakan pendorong inovasi, kapasitas sumber daya manusia inovasi, kepedulian sumber daya manusia terhadap inovasi, pengembangan sumber daya inovasi, dukungan anggaran, optimalisasi CSR dalam mendukung inovasi, dan penggunaan IT (teknologi informasi) dalam sistem kerja.

Sedangkan 20 indikator dalam output pemerintahan inovatif yaitu terdiri dari jumlah inovasi yang dihasilkan, jenis inovasi yang dihasilkan, kualitas inovasi, pedoman teknis operasional inovasi pemda, pelembagaan inovasi, ketersediaan sistem informasi layanan publik, penyelesaian layanan pengaduan, tingkat capaian hasil survey kepuasan masyarakat (SKM), peningkatan jumlah perijinan, peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan lapangan kerja, peningkatan investasi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan PAD, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tingkat partisipasi stakeholders, opini BPK terhadap laporan keuangan, nilai capaian LAKIP, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan nilai IPM.

Indikator pemerintahan inovatif menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Innovative Governance Award Tahun 2017 ada 5 indikator. Adapun 5 indikator tersebut adalah inovasi minimal telah berjalan 2 tahun, memiliki kebaharuan dan keunikan, melibatkan peran masyarakat serta stakeholder, dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah dan memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat.

Dengan demikian indikator pemerintahan inovatif memiliki ciri-ciri yaitu bertujuan untuk kepentingan bersama atau masyarakat artinya tidak untuk kepentingan pihak tertentu, memiliki pembiayaan/anggaran yang jelas serta melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan untuk indikator yang akan digunakan pada penelitian ini akan melihat dari indikator yang pertama adalah dampak inovasi bagi daerah dan masyarakat, kedua, pengembangan sumber daya inovasi, ketiga dukungan anggaran atau pembiayaan

sah lainnya, keempat, beorientasi pada kepentingan umum serta kelima yaitu melibatkan peran serta masyarakat

## 7. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer yang berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Salim dan Yenny, 2002:534)

Menurut Handayani (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut Handoko, (1997:8) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor atau instansi, tidak terkecuali di pemerintahan. Di mana dalam pengelolaan sampah telah ditetapkan satu instansi khusus menangani masalah persampahan, sehingga semua

kebijakan aktivitas pengelolaan persampahan menjadi tanggung jawab dari instansi tersebut. Pengelolaan sampah tidak hanya mengenai bagaimana proses pengangkutan sampah dan membersihkannya dari lingkungan sekitar, tetapi lebih luas dari pada itu yakni bagaimana sampah yang dihasilkan menjadi bermanfaat dan tidak merusak ekosistem lingkungan hidup.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel II.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	4
1	Yanza Ahaddin Fahmi (Universitas Muhammadiyah Malang)	Innovative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Social Empowertment Pada Pemerintah Kota Batu	Tujuan penelitiannya sama-sama, untuk mengetahui inovasi pemerintah kota/kabupaten dalam pengelolaan sampah	Penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian Yanza Ahaddin Fahmi menggunakan metode kualitatif
2	Ayu Dewanti Anggraini, Irwan Noor, Abdullah Said (Universitas Brawijaya)	Strategi Inovatif Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan (Studi Pada Bank Sampah “Sri Wilis” Perumahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri)	Permasalahannya sama-sama meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang mengakibatkan jumlah volume sampah akan meningkat karena banyaknya aktivitas yang dilakukannya dan kurangnya	Penelitian dari Ayu Dewanti, Irwan dan Abdullah Said, dilakukan untuk dapat melihat bagaimana sejauh ini Bank Sampah “Sri Wilis” Kota Kediri dalam melaksanakan program yang telah diberikan. Sedangkan penelitian saat ini



1	2	3	4	5
			pemahaman masyarakat tentang peduli akan lingkungan sekitar.	masih mencari inovasi apa yang akan dibuat
3	Hayat, Hasan Zayadi (Universitas Islam Malang)	Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Sama-sama meneliti tentang inovasi pengelolaan sampah yang baik dan benar	Penelitian Hayat dan Hasan memberi beberapa model dalam inovasi pengelolaan sampah
4	Ana Puji Lestari, Mochammad Saleh Soeaidy, Abdullah Said (Universitas Brawijaya)	Program Inovasi Pengelolaan Sampah di Kota Malang	Penelitian ini sama-sama berinovasi dalam pengelolaan sampah, inovasi dalam pengelolaan sampah adalah suatu keharusan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah	Penelitian dari Ana, Mochammad, dan Abdullah bertujuan untuk memahami, menganalisis tingkat keberhasilan dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program inovasi. Sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kab. Siak dan hambatan/kendala dalam melakukan inovasi pengelolaan sampah
5	Rizka Firdausia Fitri, Nurul Umi Ati, Suyeno (Universitas Islam Malang)	Implementasi Kebijakan pemerintah Dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi Kasus Di Taman Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randegan Kota	Teknik pengumpulan datanya sama-sama menggunakan cara observasi, kuesioner dan dokumentasi	Penelitian Rizka, Nurul, dan Suyeno fokus terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu di Taman Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randegan Kota Mojokerto.

1	2	3	4	5
		Mojokerto)		Sedangkan penelitian saat ini fokus terhadap inovasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Siak

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari permasalahan yang penulis paparkan pada latar belakang, kemudian ditentukan dengan acuan dari beberapa teori pada studi pustaka yang selanjutnya dijadikan indikator penelitian dari fenomena yang terjadi, maka penulis akan menjelaskan mengenai permasalahan penelitian tersebut yang akan digambarkan dalam kerangka pikir sebagai bentuk dari konsep kerangka pikiran penulis. Tujuan pembuatan kerangka pikir ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian serta menggambarkan bagaimana penulis melihat permasalahan penelitian ini.

Untuk lebih jelasnya mengenai teori-teori yang dijadikan indikator pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar II.1: Kerangka Pikir Tentang Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**



Sumber : *Modifikasi Penulis 2020*

#### **D. Konsep Operasional**

Konsep menurut Mardalis (2010;45) dimaksudkan untuk menjelaskan makna dan maksud dari teori yang dipakai, atau menjelaskan makna dan maksud dari teori serta menjelaskan kata-kata yang mungkin masih abstrak pengertiannya.

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian keadaan, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam pemakaian konsep yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian, maka terlebih dahulu penulis akan mengoperasionalkan sesuai dengan penelitian yang terdapat di dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Pengelolaan sampah adalah setiap orang atau dinas yang melakukan pengelolaan sampah.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
4. BLUD yaitu Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.
6. Adapun indikator inovasi dalam pengelolaan sampah yakni:



- a. Inovasi minimal telah berjalan 2 tahun dalam penelitian ini ditentukan dengan adanya program pengelolaan sampah dan program yang sudah berjalan selama 2 tahun.
- b. Memiliki kebaharuan dan keunikan dalam penelitian ini ditetapkan telah adanya usaha membuat inovasi pengelolaan sampah dan inovasi yang dibuat memiliki keunikan dan kebaharuan.
- c. Melibatkan peran masyarakat serta stakeholder dalam penelitian ini adalah telah melihat masyarakat atau stakeholder dalam pengelolaan sampah dan menerima saran dan masukan dari masyarakat atau stakeholder.
- d. Dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah dalam penelitian ini adalah telah dialokasikan anggaran pengelolaan sampah dan transparansinya sistem penganggaran pengelolaan sampah.
- e. Memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat dalam penelitian ini adalah pengelolaan sampah yang berorientasi kepada kepentingan umum dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

#### **E. Operasionalisasi Variabel**

Operasional variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator dan skala yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka operasional variabel dapat dilihat ada tabel di bawah ini :

**Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
1	2	3	4	5
Pemerintahan inovatif adalah pemerintahan yang mengondisikan, memfasilitasi dan meregulerkan praktek-praktek inovatif dalam pengelolaan kepentingan publik. (Purwo Santoso, 2016).	Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	1. Inovasi minimal telah berjalan 2 tahun	a. Membuat program pengelolaan sampah b. Program sudah berjalan selama dua tahun	Ordinal
		2. Memiliki kebaruan dan keunikan	a. Membuat inovasi pengelolaan sampah b. Inovasi yang dibuat memiliki keunikan dan kebaruan	Ordinal
		3. Melibatkan peran masyarakat serta stakeholder	a. Melibatkan masyarakat atau stakeholder dalam pengelolaan sampah b. Menerima saran dan masukan dari masyarakat atau stakeholder	Ordinal
		4. Dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah	a. Membuat anggaran pengelolaan sampah b. Transparansi atau terbukanya sistem penganggaran pengelolaan sampah	Ordinal
		5. Memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat	a. Berorientasikan kepada kepentingan umum b. Memberikan manfaat kepada masyarakat	Ordinal

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

## F. Teknik Pengukuran

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka dalam pengukuran variabel penelitian ini yakni: terlaksana, cukup terlaksana, dan kurang terlaksana.

Pengukuran yang dipergunakan dalam penganalisaan adalah dengan menggunakan persentase, yaitu kategori terlaksana dengan persentase  $\geq 67\%$ , untuk kategori cukup terlaksana dengan persentase 33%-66%, sedangkan untuk kategori kurang terlaksana dengan persentase  $\leq 33\%$ .

Untuk mengetahui Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak maka dibuatlah pengukuran variabel :

**Terlaksana** : Apabila Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah memenuhi indikator yang sudah ditentukan yang ditetapkan berada pada kategori,  $\geq 67\%$ .

**Cukup Terlaksana** : Apabila Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah memenuhi indikator yang sudah ditentukan yang ditetapkan berada pada kategori, 33%-66%.

**Kurang Terlaksana** : Apabila Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah memenuhi indikator yang sudah ditentukan yang ditetapkan berada pada kategori,  $\leq 33\%$ .

Sementara untuk masing-masing indikator yang digunakan pada penelitian ini ditetapkan teknik pengukurannya sebagai berikut:

1. Inovasi Minimal Berjalan 2 Tahun, dikatakan:

Terlaksana : Apabila tanggapan responden tentang indikator ini berada pada rentang persentase  $\geq 67\%$ .

Cukup Terlaksana : Apabila tanggapan responden tentang indikator ini berada pada rentang persentase 33%-66%.

Kurang Terlaksana: Apabila tanggapan responden tentang indikator ini berada pada rentang persentase  $\leq 33\%$ .

2. Memiliki Kebaharuan dan Keunikan, dikatakan:

Terlaksana : Apabila tanggapan responden tentang indikator ini berada pada rentang persentase  $\geq 67\%$ .

Cukup Terlaksana : Apabila tanggapan responden tentang indikator ini berada pada rentang persentase 33%-66%.

Kurang Terlaksana: Apabila tanggapan responden tentang indikator ini berada pada rentang persentase  $\leq 33\%$ .

3. Melibatkan peran masyarakat serta stakeholder, dikatakan:

Terlaksana : Apabila tanggapan responden tentang indikator ini berada pada rentang persentase  $\geq 67\%$ .

Cukup Terlaksana : Apabila tanggapan responden tentang indikator ini berada pada rentang persentase 33%-66%.

Kurang Terlaksana: Apabila tanggapan responden tentang indikator ini berada pada rentang persentase  $\leq 33\%$ .



4. Dibiayai APBD dan atau Pembiayaan yang Sah, dikatakan:

Terlaksana : Apabila tanggapan responden tentang indikator ini berada pada rentang persentase  $\geq 67\%$ .

Cukup Terlaksana : Apabila tanggapan responden tentang indikator ini berada pada rentang persentase 33%-66%.

Kurang Terlaksana: Apabila tanggapan responden tentang indikator ini berada pada rentang persentase  $\leq 33\%$ .

5. Memberikan Dampak atau Manfaat Bagi Daerah dan Masyarakat, dikatakan:

Terlaksana : Apabila tanggapan responden tentang indikator ini berada pada rentang persentase  $\geq 67\%$ .

Cukup Terlaksana : Apabila tanggapan responden tentang indikator ini berada pada rentang persentase 33%-66%.

Kurang Terlaksana: Apabila tanggapan responden tentang indikator ini berada pada rentang persentase  $\leq 33\%$ .

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas penelitian ini adalah :

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dan kualitatif yang mana penelitian ini menuntut peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya dan wawancara, penafsiran terhadap data dengan menggunakan angka tersebut serta penampilan dari hasilnya dalam bentuk tabel. Selanjutnya untuk menjelaskan isi dari tabel tersebut penulis menggunakan penjelasan data tipe Deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi dan mengenai bidang tertentu, (Azwar,2010;7).

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Siak dengan alasan masih ditemukannya beberapa fenomena-fenomena tentang penyelenggaraan inovasi dalam pengelolaan sampah.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek atau elemen yang terdapat dalam suatu penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Populasi yang dimaksud tersebut yaitu Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dan Masyarakat Kecamatan Tualang.

**Tabel III.1 Populasi dan Sampel Tentang Penyelenggaraan Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

No	Jenis Populasi	Jumlah	
		Populasi	Sampel
1.	Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak	1	1
2.	Pegawai Kebersihan di Tualang	7	2
3.	Masyarakat Kecamatan Tualang - Kelurahan Perawang	42.982	48
Jumlah		42.990	51

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

### D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan penulis menentukan sampel penelitian untuk Kepala Bidang dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, penulis menggunakan teknik penarikan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Adapun untuk masyarakat teknik yang digunakan yaitu teknik insidental sampling yakni teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan / *incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai nara sumber. Sampel

masyarakat berasal dari 1 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tualang yakni Kelurahan Perawang.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara dan pedoman kuesioner yang telah disiapkan terlebih dahulu.

##### **b. Data Sekunder**

Yaitu data pendukung yang berkenaan dengan peraturan, penjelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

##### **a. Observasi**

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.



b. Kuesioner

Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan dengan alternatif jawaban yang disebarakan kepada masyarakat yang dijadikan sampel, setelah diisi/dijawab kuesioner tersebut dikembalikan kepada peneliti sehingga dapat penulis ketahui apa yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

**G. Teknik Analisis Data**

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian melalui penelitian berupa daftar pertanyaan atau kuesioner, selanjutnya dikelompokkan dan diolah secara kuantitatif atau pengelompokan dan penyajian data melalui angka-angka berbentuk tabel data tunggal. Kemudian data tersebut dipresentasikan dan dijelaskan serta dianalisa secara deskriptif sesuai dengan data yang didapatkan guna analisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian guna mendapatkan hasil penelitian tersebut kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan tersebut.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kecamatan Tualang

##### 1. Letak Georafis Kecamatan Tualang

Wilayah Kecamatan Tualang terletak antara 0°32'- 0°51' Lintang Utara 101°28'-101°52' Bujur Timur dengan luas keseluruhan Kecamatan Tualang yaitu 373,75 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Tualang terdiri dari 8 (delapan) desa dan 1 (satu) kelurahan, sedangkan jarak desa paling jauh dari pusat pemerintahan kecamatan hanya kurang lebih 15 km dan hanya 2 ( dua) desa saja yaitu desa Maredan dan desa Tualang Timur. Kecamatan Tualang terdiri dari perbukitan dan sebagian kecil daerah perairan yang dihuni suku asli Riau.

Kecamatan Tualang berbatasan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Minas

Sebelah Selatan : Kecamatan Kerinci Kanan dan Lubuk Dalam

Sebelah Barat : Kecamatan Minas dan Kota Pekanbaru

Sebelah Timur : Kecamatan Koto Gasip dan Lubuk Dalam

##### 2. Pemerintahan

Kecamatan Tualang terdiri dari 9 desa/kelurahan. Di mana masing-masing desa/kelurahan tersebut memiliki perangkat pemerintah yang mendukung dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Adapun perangkat pemerintah di masing-masing desa/kelurahan sebagai berikut:

**Tabel IV.1 Jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tualang**

No	Desa/Kelurahan	Perangkat			
		Pegawai/ Aparat	Kepala Dusun	RW	RT
1	Tualang	7	4	9	67
2	Perawang	12	6	8	91
3	Perawang Barat	10	5	9	74
4	Maredan	8	4	7	22
5	Maredan Barat	11	5	4	12
6	Pinang Sebatang	9	5	5	16
7	Pinang Sebatang Barat	8	4	5	18
8	Pinang Sebatang Timur	10	5	6	24
9	Tualang Timur	8	4	7	20
	Jumlah	83	42	80	344

Sumber: Kantor Camat Tualang, 2020

### 3. Keadaan Penduduk

Hasil registrasi penduduk di Kecamatan Tualang Tahun 2020 sebanyak 109.229 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 57.574 jiwa dan perempuan sebanyak 51.655 jiwa sehingga didapatkan sex ratio sebesar 111. Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 26.186 sehingga diperoleh penduduk per rumah tangga adalah 4,17. Penyebaran serta persentase pada masing-masing desa/kelurahan sebagai berikut :

**Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Tualang Tahun 2020**

No	Desa/Kelurahan	Penduduk	Persentase
1	Tualang	15.724	14,1
2	Kelurahan Perawang	43.843	39,4
3	Perawang Barat	23.256	21,1
4	Maredan	3.426	3,6
5	Maredan Barat	2.814	2,2
6	Pinang Sebatang	4.656	3,6
7	Pinang Sebatang Barat	5.237	4,7
8	Pinang Sebatang Timur	9.413	2,7
9	Tualang Timur	5.825	3,2
	Jumlah	114.194	100

Sumber: Kantor Camat Tualang, 2020

#### 4. Pendidikan

Kecamatan Tualang yang dihuni sekitar 114.194, sehingga dibutuhkan sarana prasarana pendidikan yang mendukungnya. Sarana prasarana pendidikan yang ada didirikan oleh pemerintah dan juga swasta, sehingga keberadaan dari sarana prasarana pendidikan ini mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat.

**Tabel IV.3 Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Tualang**

No	Desa/Kelurahan	SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Tualang	3	5	1	1	1	2
2	Perawang	3	9	1	2	-	1
3	Perawang Barat	4	5	3	5	3	6
4	Maredan	4	-	2	-	1	-
5	Maredan Barat	2	-	1	1	1	1
6	Pinang Sebatang	1	-	2	-	-	-
7	Pinang Sebatang Barat	2	1	2	1	-	-
8	Pinang Sebatang Timur	2	2	1	1	1	-
9	Tualang Timur	1	-	1	-	-	-
	Jumlah	22	22	14	14	7	10

Sumber: Kantor Camat Tualang, 2020

Data di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Tualang telah berdiri banyak lembaga pendidikan yang berstatus negeri dan swasta. Sarana pendidikan yang tersedia mulai dari tingkat dasar yakni SD/MI sampai ke tingkat pendidikan menengah atas yakni SMA/SMK/MA. Dengan demikian jelaslah bahwa dari jumlah lembaga pendidikan yang cukup banyak terdapat di Kecamatan Tualang, tentunya sebagian masyarakat yang ada telah mengenyam pendidikan.

#### 5. Kesehatan

Sarana kesehatan penting keberadaannya dalam satu wilayah, begitu juga di Kecamatan Tualang terdapat beberapa jenis sarana kesehatan yang disediakan



oleh pemerintah maupun diusahakan oleh swasta. Adapun lembaga kesehatan yang terdapat di Kecamatan Tualang yakni:

**Tabel IV.4 Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan di Kecamatan Tualang**

No	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Apotek
1	Tualang	-	-	1	-
2	Perawang	-	5	1	6
3	Perawang Barat	1	2	-	2
4	Maredan	-	1	-	-
5	Maredan Barat	-	-	-	-
6	Pinang Sebatang	-	-	-	-
7	Pinang Sebatang Barat	-	-	-	1
8	Pinang Sebatang Timur	-	-	-	-
9	Tualang Timur	-	-	-	-
	Jumlah	1	8	2	9

Sumber: Kantor Camat Tualang, 2020

Tabel di atas menjelaskan bahwa di Kecamatan Tualang terdapat banyak sarana kesehatan yang bisa dijangkau oleh masyarakat dalam membutuhkan perawatan/konsultasi/dan pengobatan atas kesehatan dirinya.

## 6. Sarana Ibadah

Kecamatan Tualang merupakan wilayah yang dihuni oleh beragam suku bangsa dan tentunya agama yang berbeda, sehingga banyak terdapat sarana atau tempat ibadah dari beberapa agama. Adanya sarana ibadah ini memudahkan pemeluknya untuk menjalankan agama yang dianutnya. Adapun sarana ibadah di Kecamatan Tualang sebagai berikut:

**Tabel IV.5 Jumlah Sarana Ibadah Kecamatan Tualang**

No	Desa/Kelurahan	Masjid	Musholla/ Surau	Gereja	Wihara	Klenteng
1	Tualang	10	14	10	1	-
2	Perawang	28	14	3	1	-
3	Perawang Barat	18	4	11	-	-
4	Maredan	7	-	-	-	-
5	Maredan Barat	3	3	1	-	-
6	Pinang Sebatang	3	4	1	-	1
7	Pinang Sebatang Barat	6	4	1	-	-
8	Pinang Sebatang Timur	6	4	1	-	-
9	Tualang Timur	7	3	5	-	-
	Jumlah	88	50	33	2	1

Sumber: Kantor Camat Tualang, 2020

Berdasarkan tabel di atas sangat jelas terlihat bahwa pendudukan yang menghuni Kecamatan Tualang memiliki keyakinan atau agama yang beragam. Di mana jumlah penduduk yang terbanyak adalah pemeluk agama Islam, kemudian diikuti oleh pemeluk agama Kristen. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk yang mendiami Kecamatan Tualang setidaknya memiliki keyakinan atau beragama Islam, Kristen, Budha, dan keyakinan lainnya.

## **B. Gambaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak**

Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi berlandaskan dari Peraturan Bupati Siak. Adapun kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dapat dijelaskan berikut ini:

### **1. Kedudukan Dinas Lingkungan hidup**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang lingkungan hidup yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup diberikan kewenangan menyelenggarakan di bidang lingkungan hidup.

## **2. Tugas Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.

## **3. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- b. Pengkajian, perumusan, penyusunan kebijakan teknis daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pengkoordinasian Kegiatan Fungsional Badan Lingkungan Hidup;
- d. Penguatan dan pemfasilitasian kegiatan masyarakat dan pemerintah di daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia, peran serta seluruh mitra lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan dan peningkatan secara sukarela perangkat manajemen serta alternatif teknologi yang berorientasi ramah lingkungan;
- f. Pengembangan sistem dan layanan data dan informasi serta hubungan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;

- g. Perencanaan, pengembangan, dan pembangunan jejaring kerja dengan berbagai mitra lingkungan untuk meningkatkan kepedulian lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup;
- h. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah;
- i. Pengembangan kesiapsiagaan dan tanggap darurat terhadap bencana lingkungan, sarana pengendalian dampak lingkungan dan sumberdaya di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- j. Pengendalian kualitas lingkungan hidup di daerah dengan melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, pembimbingan dan evaluasi teknis pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- k. Pemantauan, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

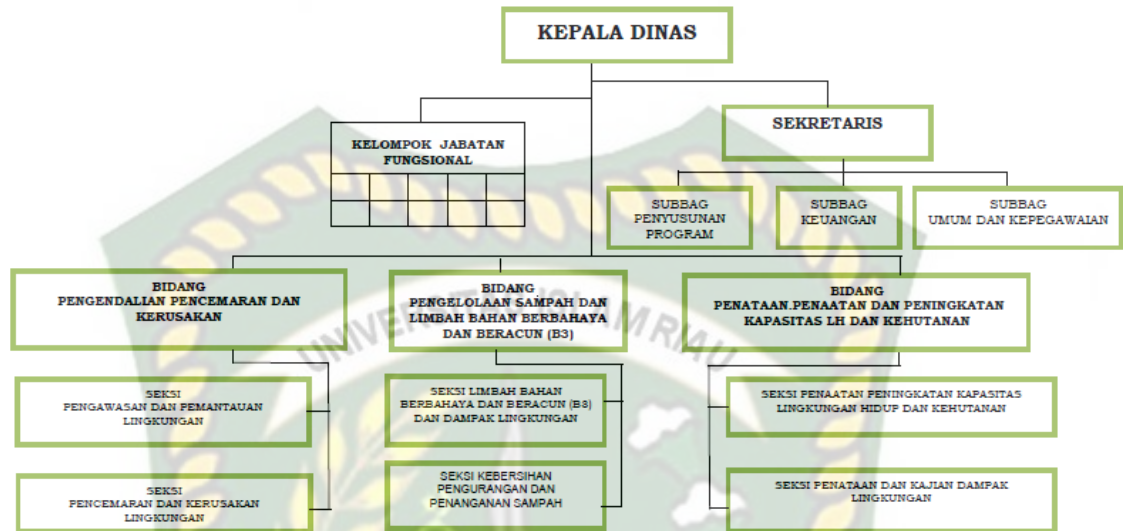
- (1) Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris;
  - a. Subbag Penyusunan Program
  - b. Subbag Keuangan
  - c. Subbag Umum dan Kepegawaian
- (3) Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan Kehutanan



- a. Seksi Penataan dan Kajian Dampak Lingkungan
  - b. Seksi Penataan, Peningkatan Kapasitas LH dan Kehutangan
- (4) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- a. Seksi Kebersihan, Pengurangan dan Penanganan Sampah
  - b. Seksi Limbah B3
- (5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- a. Seksi Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan
  - b. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- (6) Unit Pelaksana Teknis;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Salah satu Bidang yang diberikan kewenangan untuk menangani masalah sampah adalah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dengan ditetapkan seksi khusus untuk menangani masalah sampah yakni Seksi Kebersihan Pengurangan dan Penanganan Sampah. Di mana Seksi Kebersihan Pengurangan dan Penanganan Sampah memiliki tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi kebersihan pengurangan dan penanganan sampah.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan salah satu bagian yang penting untuk ditampilkan sebagai gambaran dari sumber-sumber data yang diperoleh untuk ditelaah dan di analisis pada penelitian ini. Identitas adalah karakteristik yang melekat pada setiap individu, sehingga pada penelitian ini ditampilkan karakteristik tersebut dalam bentuk usia, jenis kelamin, pendidikan, dan jenis pekerjaan. Untuk itu dari masing-masing karakteristik ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Usia

Usia adalah masa hidup yang telah dijalani para responden, sehingga dengan makin matangnya usia seseorang tentunya telah banyak pengetahuan dan pengalaman yang telah terserap. Tingkat usia bisa dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam melakukan penilaian atas perkembangan pada lingkungan yang terjadi. Adapun tingkat usia responden dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.1 Distribusi Tingkat Usia Responden**

No.	Rentang Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	20 – 30	26	52%
2	31 – 40	11	22%
3	41 – 50	9	18%
4	> 51	4	8%
Total		50	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2021.

Data yang tertuang pada tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden berada pada rentang usia 20 – 57 tahun. Di mana pada rentang usia 20-30 tahun terdapat sebanyak 26 orang responden, pada rentang usia 31-40 terdapat sebanyak 11 orang responden, sementara pada rentang usia 41-50 tahun sebanyak 9 orang responden, dan pada rentang usia di atas 51 tahun sebanyak 4 orang responden.

Dengan demikian dari data tingkat usia responden di atas, maka dapat dikatakan bahwa responden pada penelitian ini berada pada tingkat usia yang masih produktif. Di mana dengan rentang usia yang produktif tentunya para responden telah mengalami berbagai pengalaman dan memiliki pengetahuan terutama mengenai permasalahan penelitian.

## 2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin salah satu karakteristik individu yang bisa terlihat secara kasat mata, sehingga dari jenis kelamin ini dapat dibedakan secara langsung tanpa harus memintai keterangan. Adapun jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.2 Distribusi Jenis Kelamin Responden**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	30	60%
2	Perempuan	20	40%
	Total	50	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2021.

Data mengenai jenis kelamin responden yang tertuang pada tabel di atas menjelaskan bahwa pada penelitian ini telah terwakili secara langsung dari dua



jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Di mana terdapat sebanyak 30 orang responden berjenis kelamin laki-laki, dan terdapat sebanyak 20 orang responden berjenis kelamin perempuan. Identitas responden dari jenis kelamin ini memberikan gambaran bahwa dalam penelitian ini telah terpenuhi unsur keterwakilan dari jenis kelamin..

Adanya keterwakilan laki-laki dan perempuan pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan tanggapan yang sesuai dengan apa terjadi sebenarnya mengenai inovasi pengolahan sampah yang ada di Kecamatan Tualang.

### 3. Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan latar belakang pendidikan yang pernah dicapai oleh para responden. Di mana tingkat pendidikan memberikan gambaran tentang pengetahuan dari seseorang, minimal dari pendidikan yang dimiliki meningkatnya kemampuan tulis baca. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan responden, maka dapat dilihat pada tabel distribusi data berikut:

**Tabel V.3 Distribusi Tingkat Pendidikan Responden**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SD	2	4%
2	SMP	2	4%
3	SMA	33	66%
4	D-3	1	2%
5	S-1	11	22%
6	S-2	1	2%
Total		50	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2021.

Data mengenai tingkat pendidikan yang dimiliki responden tertuang pada tabel di atas memberikan gambaran bahwa seluruh responden yang ada telah

mengecapi bangku pendidikan mulai dari paling rendah SD sampai yang paling tinggi Strata Dua (S-2). Di mana terdapat sebanyak 2 orang yang memiliki latar belakang pendidikan tamatan SD, kemudian terdapat sebanyak 2 orang yang memiliki tingkat pendidikan akhir SMP, dan paling banyak yang memiliki latar belakang pendidikan SMA yakni 33 orang. Sedangkan dari tingkat pendidikan D-3 terdapat sebanyak 1 orang, pada tingkat pendidikan Strata Satu (S-1) sebanyak 11 orang, dan pada tingkat pendidikan Strata Dua (S-2) sebanyak 1 orang.

Hasil penelitian dari data tingkat pendidikan responden ini, dinyatakan seluruh responden telah memiliki kemampuan dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Terdapat tingkat pendidikan responden yang mulai dari SD sampai S-2, sehingga diharapkan dari latar belakang pendidikan yang dimiliki responden ini mampu memberikan tanggapan sesuai fakta lapangan yang terjadi mengenai inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang.

## **B. Analisis Hasil Penelitian**

Sampah merupakan berbagai barang yang tidak terpakai atau digunakan baik yang disengaja ada maupun tidak disengaja. Di mana sampah yang disengaja ada adalah sampah yang berasal dari rumah tangga yang diproduksi oleh rumah tangga itu sendiri dalam berbagai bentuk baik yang bisa diolah kembali maupun tidak bisa diolah lagi. Sedangkan sampah yang tidak disengaja keberadaannya adalah sampah dari pepohonan yang mati dan sebagainya.

Sampah sampai ini telah menjadi permasalahan bagi lingkungan hidup dalam jangka waktu yang panjang bila tidak terkelola dengan baik. Di mana

sampah yang dihasilkan dari aktivitas kehidupan manusia sangat besar jumlahnya, sehingga membutuhkan pengelolaan sampah yang baik agar keberadaan sampah-sampah ini menjadi terkendali dan tidak menjadi permasalahan bagi lingkungan hidup serta mengganggu ekosistem yang ada.

Pengelolaan sampah perlu mendapatkan perhatian dari semua kalangan terutama dari pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam menata lingkungan hidup di wilayahnya. Di mana pengelolaan sampah tidak hanya dengan cara tradisional yakni membakar tumpukan sampah yang telah dikumpul, tetapi saat ini telah banyak pola atau langkah yang bisa diterapkan dalam pengelolaan sampah seperti mengadakan inovasi dalam pengelolaan sampah. Upaya inovasi dilakukan untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan dan juga memanfaatkan sampah memiliki nilai jual yang bersifat ekonomis bagi masyarakat yang turut serta mengelola sampah.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan membahas mengenai masalah sampah yang ada di Kabupaten Siak terutama di Kecamatan Tualang. Untuk menjawab permasalahan sampah peneliti menitik fokuskan pada inovasi dalam pengelolaan sampah yang ada oleh Dinas Lingkungan Hidup.

### **1. Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

Inovasi merupakan langkah-langkah baru atau kombinasi cara lama dan cara baru untuk menangani masalah permasalahan, sehingga sampah-sampah yang ada mampu terkelola dengan baik dan bisa memberi dampak positif bila terkelola dengan baik. Untuk itu inovasi atas pengelolaan sampah sangat penting untuk

diwujudkan, agar beragam permasalahan yang ditimbulkan akibat sampah dapat di atasi.

Pada penelitian ini inovasi dalam pengelolaan sampah dilihat dalam beberapa indikator, masing-masing indikator dijelaskan secara terpisah sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian dari masing-masing indikator maupun secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Inovasi minimal telah berjalan 2 tahun

Inovasi minimal telah berjalan 2 tahun merupakan salah satu indikator yang ditetapkan pada penelitian ini mengacu dari ketentuan yang ada dalam penilaian mengenai inovasi. Di mana acuan inovasi minimal telah berjalan 2 dilihat dari adanya program pengelolaan sampah dan program tersebut sudah berjalan selama dua tahun. Adapun tanggapan yang disampaikan para responden mengenai indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.4 Distribusi Tanggapan Responden pada Indikator Inovasi Minimal Telah Berjalan 2 Tahun**

No.	Pertanyaan	Tanggapan			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Membuat program pengelolaan sampah	38	6	6	50
2	Program sudah berjalan selama dua tahun	34	8	8	50
Jumlah		72	14	14	100
Rata-rata		36	7	7	50
Persentase		72%	14%	14%	100%
Penilaian		Terlaksana			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021.



Berdasarkan data yang telah ditampilkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan indikator inovasi minimal telah berjalan 2 tahun berada pada kategori terlaksana. Di mana sebagian besar responden mengatakan terlaksana sejumlah 36 orang, mengatakan cukup terlaksana 7 orang, dan mengatakan kurang terlaksana sebanyak 7 orang.

Tanggapan atas pertanyaan yang diberikan dapat diuraikan satu persatu bahwa pada pertanyaan membuat program pengelolaan sampah sebanyak 38 orang responden menyatakan terlaksana, sejumlah 6 orang menyatakan cukup terlaksana, dan sebanyak 6 orang menyatakan kurang terlaksana. Hasil ini memberikan penjelasan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak telah membuat program pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang dengan menetapkan petugas kebersihan, menyediakan tempat penampungan sampah sementara, disediakan lokasi penampung sampah akhir, telah memfasilitasi masyarakat dan menggalakkan masyarakat untuk membuat dan berpartisipasi pada bank sampah yang telah dibentuk. Dengan demikian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak telah membuat program pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang tepatnya berada di Kelurahan Perawang.

Pertanyaan mengenai program sudah berjalan selama dua tahun ditanggapi sebanyak 34 orang responden menyatakan terlaksana, sebanyak 8 orang responden memberikan tanggapan cukup terlaksana, dan sebanyak 8 orang menyatakan kurang terlaksana. Hasil ini memberikan penjelasan bahwa program-program yang telah dibuat Dinas lingkungan Hidup dalam inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang telah berjalan lebih dari 2 tahun, sehingga program

yang telah dijalankan ini mampu menjaga kebersihan dan sampah dapat dikendalikan. Di mana program yang telah berjalan lebih dari 2 tahun ini adalah Dinas Lingkungan Hidup telah memfasilitasi masyarakat untuk membuat Bank Sampah dan menghasilkan berbagai produk dari berbagai bahan baku berasal dari sampah yang ada di Kecamatan Tualang.

Di Kecamatan Tualang telah ada inovasi pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dengan memfasilitasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat. Di mana inovasi pengelolaan sampah dalam bentuk terbentuknya Bank Sampah yang menampung sampah-sampah yang layak untuk dimanfaatkan kembali atau diolah kembali untuk menjadi suatu produk dan lainnya yang bernilai ekonomi. Bank Sampah ini dikelola oleh masyarakat di Kelurahan Perawang yang berada di bawah pembinaan Dinas Lingkungan Hidup sudah berdiri sejak tahun 2017. Dengan demikian untuk pengelolaan sampah minimal telah berjalan 2 tahun di Kecamatan Tualang yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup telah berjalan.

Bank Sampah dalam melakukan inovasinya adalah pada pengelolaan sampah dengan menyortir sampah yang masuk ke TPA dan mengajak masyarakat sekitar khususnya yang berada di Kelurahan Perawang untuk berperan serta dalam mengumpulkan sampah-sampah yang bisa digunakan kembali seperti botol plastik, bungkus plastik, dan sebagainya. Kemudian Bank Sampah mengolah sampah dijadikan berbagai produk yang bisa menambah nilai jual. Selain itu Bank Sampah juga memberikan keuntungan kepada masyarakat sekitar yang turut serta menyeter sampahnya ke Bank Sampah dan diberi tabungan dalam bentuk uang.

Hasil ini menggambarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah membuat program pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang dan program tersebut telah berjalan lebih dari dua tahun. Dengan demikian dari dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan langkah-langkah inovasi, sehingga pengelolaan sampah dari waktu ke waktu di Kecamatan Tualang menjadi semakin baik.

#### **b. Memiliki kebaruaran dan keunikan**

Memiliki kebaruaran dan keunikan merupakan salah satu indikator yang ditetapkan pada penelitian ini mengacu dari ketentuan yang ada dalam penilaian mengenai inovasi. Di mana indikator ini diukur melalui membuat inovasi pengelolaan sampah dan inovasi yang dibuat memiliki keunikan dan kebaruaran. Adapun tanggapan yang disampaikan para responden mengenai indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.5 Distribusi Tanggapan Responden pada Indikator Memiliki Kebaruaran dan Keunikan**

No.	Pertanyaan	Tanggapan			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Membuat inovasi pengelolaan sampah	28	16	6	50
2	Inovasi yang dibuat memiliki keunikan dan kebaruaran	28	12	10	50
Jumlah		56	28	16	100
Rata-rata		28	14	8	50
Persentase		56%	28%	16%	100%
Penilaian		Terlaksana			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021.

Berdasarkan data yang telah ditampilkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan indikator memiliki kebaruaran dan keunikan berada

pada kategori terlaksana. Di mana sebagian besar responden mengatakan terlaksana sejumlah 28 orang, mengatakan cukup terlaksana 14 orang, dan mengatakan kurang terlaksana sebanyak 8 orang.

Tanggapan disampaikan responden pada pertanyaan membuat inovasi pengelolaan sampah yang mengatakan terlaksana sebanyak 28 orang, cukup terlaksana 16 orang dan mengatakan kurang terlaksana sebanyak 6 orang. Hasil tanggapan ini memberikan gambaran bahwa di Kecamatan Tualang Dinas Lingkungan Hidup telah membuat inovasi pengelolaan sampah melalui pemilihan sampah sesuai dengan jenisnya seperti sampah organik dan non organik, kemudian memfasilitasi masyarakat untuk membuat Bank Sampah yang dikelola langsung oleh masyarakat.

Pada tanggapan mengenai inovasi yang dibuat memiliki keunikan dan kebaruan. Di mana para responden memberikan tanggapan terlaksana sebanyak 28 orang, tanggapan cukup terlaksana sebanyak 12 orang, dan tanggapan kurang terlaksana sebanyak 10 orang. Tanggapan ini menjelaskan bahwa ada beberapa program yang telah dijalankan Dinas Lingkungan Hidup dalam menginovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang yakni memfasilitasi masyarakat membentuk bank sampah dan memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah secara ecobrick dan pemilahan sampah organik dan non organik. Namun dari beberapa program yang telah ditetapkan hanya bank sampah yang berjalan di masyarakat dan pemilihan sampah organik non organik yang terlaksana di tempat pembuangan akhir dengan mempekerjakan masyarakat sekitar sebagai tenaga pemilah sampah.



Adanya inovasi yang dilakukan dalam pengelolaan sampah dengan membuat Bank Sampah dan mengedukasikan masyarakat pada program ecobrick. Dalam Bank Sampah telah menghasilkan beberapa produk yang berasal dari barang bekas dihasilkan oleh pengurus Bank Sampah dan sementara ecobrick belum terlihat secara nyata hasilnya namun dari sisi perkembangannya telah ada beberapa masyarakat mampu mengelola sampah yang berasal dari plastik dicacah dan diolah menjadi berbagai produk dari plastik seperti membuat kursi. Kemudian di lokasi pembuangan sampah akhir telah ada beberapa pekerja yang bertugas melakukan pemilihan jenis sampah organik non organik.

Hasil ini menggambarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah membuat inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang dan inovasi yang dibuat memiliki keunikan dan kebaharuan seperti contoh melakukan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat untuk mendirikan Bank Sampah. Dengan demikian dari dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki keunikan dan kebaharuan, sehingga pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang dari waktu ke waktu semakin baik. Adanya usaha pengelolaan sampah yang memiliki keunikan dan kebaharuan ini diharapkan mampu mengurangi tumpukan sampah yang semakin besar jumlahnya dan juga memberi dampak kepada masyarakat dalam memanfaatkan sampah menjadi barang atau produk bernilai jual ekonomis.

### **c. Melibatkan peran masyarakat serta *stakeholder***

Melibatkan peran masyarakat serta *stakeholder* merupakan salah satu indikator yang ditetapkan pada penelitian ini mengacu dari ketentuan yang ada dalam penilaian mengenai inovasi. Di mana indikator ini ditetapkan dengan

memberikan pertanyaan tentang melibatkan masyarakat atau stakeholder dalam pengelolaan sampah dan menerima saran masukan dari masyarakat atau stakeholder. Adapun tanggapan yang disampaikan para responden mengenai indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.6 Distribusi Tanggapan Responden pada Indikator Melibatkan Peran Masyarakat serta stakeholder**

No.	Pertanyaan	Tanggapan			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melibatkan masyarakat atau stakeholder dalam pengelolaan sampah	32	12	6	50
2	Menerima saran dan masukan dari masyarakat atau stakeholder	26	18	6	50
Jumlah		58	30	12	100
Rata-rata		29	15	6	50
Persentase		58%	30%	12%	100%
Penilaian		Terlaksana			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021.

Berdasarkan data yang telah ditampilkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan indikator melibatkan peran masyarakat serta *stakeholder* berada pada kategori terlaksana. Di mana sebagian besar responden mengatakan terlaksana sejumlah 29 orang, mengatakan cukup terlaksana 15 orang, dan mengatakan kurang terlaksana sebanyak 6 orang.

Hasil ini diperoleh dari tanggapan responden pada pertanyaan tentang melibatkan masyarakat atau stakeholder dalam pengelolaan sampah. Di mana terdapat sebanyak 32 orang menyatakan terlaksana, sebanyak 12 orang menyatakan cukup terlaksana, dan sebanyak 6 orang menyatakan kurang

terlaksana. Tanggapan ini memberikan penjelasan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melibatkan masyarakat sekitar TPA yang ada di Kecamatan Tualang untuk turut serta mengolah sampah menjadi produk yang bernilai jual melalui pembentukan Bank Sampah.

Kemudian dari tanggapan mengenai menerima saran dan masukan dari masyarakat atau stakeholder terdapat sebanyak 26 orang menyatakan terlaksana, sebanyak 18 orang menyatakan cukup terlaksana, dan terdapat 6 orang menyatakan kurang terlaksana. Tanggapan ini memberikan penjelasan Dinas Lingkungan Hidup dengan terbuka memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memberi saran atau masukan pada pengelolaan sampah yang lebih baik lagi.

Masyarakat telah dilibatkan dalam pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Tualang. Di mana pada saat ini masyarakat yang terlibat aktif dalam pengelolaan sampah yakni masyarakat yang berada di Kelurahan Perawang, dikarenakan dekat dengan lokasi TPA sehingga masyarakat mengambil bagian dalam pengelolaan sampah menjadi produk yang bernilai jual dengan mengedepankan kerja sama melalui Bank Sampah dan melalui program ecobrick.

Hasil ini menggambarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melibatkan peran masyarakat serta *stakeholder* dalam melakukan langkah inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang dan menerima saran atau masukan dari masyarakat, sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Di mana masukan dan saran masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah penyediaan tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan non organik, selain itu

masyarakat meminta adanya pelatihan-pelatihan untuk menjadi sampah sebagai bahan baku produk atau bernilai ekonomis.

Dengan demikian dari dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup telah melibatkan peran masyarakat serta *stakeholder*, sehingga pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang dari waktu ke waktu semakin baik. Hasil ini memberikan gambaran bahwa Dinas Lingkungan hidup telah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan saran dalam pengelolaan sampah yang lebih baik lagi.

#### d. Dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah

Dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah merupakan salah satu indikator yang ditetapkan pada penelitian ini mengacu dari ketentuan yang ada dalam penilaian mengenai inovasi. Adapun tanggapan yang disampaikan para responden mengenai indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.7 Distribusi Tanggapan Responden pada Indikator Dibiayai APBD dan atau Pembiayaan yang Sah**

No.	Pertanyaan	Tanggapan			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Membuat anggaran pengelolaan sampah	27	16	7	50
2	Transparansi atau terbukanya sistem penganggaran pengelolaan sampah	27	16	7	50
Jumlah		54	32	14	100
Rata-rata		27	16	7	50
Persentase		54%	32%	14%	100%
Penilaian		Terlaksana			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021.



Berdasarkan data yang telah ditampilkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan indikator Dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah berada pada kategori terlaksana. Di mana sebagian besar responden mengatakan terlaksana sejumlah 27 orang, mengatakan cukup terlaksana 16 orang, dan mengatakan kurang terlaksana sebanyak 7 orang.

Hasil di atas diperoleh dari tanggapan yang diberikan responden pada pertanyaan membuat anggaran pengelolaan sampah sebanyak 27 orang menyatakan terlaksana, sebanyak 16 orang menyatakan cukup terlaksana, dan terdapat sebanyak 7 orang menyatakan kurang terlaksana. Di mana setiap tahunnya Dinas Lingkungan Hidup telah membuat anggaran dalam pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Tualang dengan besaran anggaran yang disiapkan sesuai dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian jelaslah bahwa telah ada anggaran pengelolaan sampah yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang.

Kemudian pada pertanyaan mengenai transparansi atau terbukanya sistem penganggaran pengelolaan sampah terdapat sebanyak 27 orang menyatakan terlaksana, sebanyak 16 orang menyatakan cukup terlaksana, dan terdapat sebanyak 7 orang menyatakan kurang terlaksana. Di mana Dinas Lingkungan Hidup telah transparansi atau terbukanya sistem penganggaran dalam pengelolaan sampah terutama pada pelelangan pekerjaan dalam berbagai hal berkenaan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang, sehingga sebagian masyarakat mengetahui alokasi anggaran pada masalah tertentu yang dipublikasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Hasil ini menggambarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah dalam melakukan langkah inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang dan adanya transparansi atau terbukanya sistem penganggaran pengelolaan sampah, sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih baik dan apa yang dikerjakan dalam pengelolaan sampah diketahui masyarakat semisal nya perwakilan dari masyarakat yakni DPRD.

Dengan demikian dari dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup telah dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah, sehingga pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagian telah dilakukan secara terbuka, hal ini dilakukan pada beberapa pekerjaan yang dilelang secara umum, sehingga untuk keterbukaan anggaran telah dilaksanakan.

#### **e. Memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat**

Memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat merupakan salah satu indikator yang ditetapkan pada penelitian ini mengacu dari ketentuan yang ada dalam penilaian mengenai inovasi. Indikator ini ditetapkan dengan pengukuran dari pertanyaan tentang berorientasikan kepada kepentingan umum dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Adapun tanggapan yang disampaikan para responden mengenai indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.8 Distribusi Tanggapan Responden pada Indikator Memberikan Dampak atau Manfaat Bagi Daerah dan Masyarakat**

No.	Pertanyaan	Tanggapan			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Berorientasikan kepada kepentingan umum	27	17	6	50
2	Memberikan manfaat kepada masyarakat	25	21	4	50
Jumlah		52	38	10	100
Rata-rata		26	19	5	50
Persentase		52%	38%	10%	100%
Penilaian		Terlaksana			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021.

Berdasarkan data yang telah ditampilkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan indikator memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat berada pada kategori terlaksana. Di mana sebagian besar responden mengatakan terlaksana sejumlah 26 orang, mengatakan cukup terlaksana 19 orang, dan mengatakan kurang terlaksana sebanyak 5 orang.

Pada pertanyaan mengenai berorientasikan kepada kepentingan umum. Terdapat sebanyak 27 orang responden menyatakan terlaksana, terdapat 17 orang menyatakan cukup terlaksana, dan terdapat 6 orang menyatakan kurang terlaksana. Hasil ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan sampah yang telah dijalankan saat ini di Kecamatan Tualang berorientasi kepada kepentingan umum, sehingga pengelolaan sampah dilakukan dengan sebaik mungkin dan melibatkan masyarakat dalam mengelola sampah yang ada.

Kemudian pada pertanyaan mengenai memberikan manfaat kepada masyarakat. Terdapat sebanyak 25 orang responden menyatakan terlaksana, sebanyak 21 orang menyatakan cukup terlaksana, dan terdapat 4 orang

menyatakan kurang terlaksana. Hasil jelas memberikan gambaran bahwa pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kecamatan Tualang telah memberikan manfaat kepada masyarakat. Di mana masyarakat tidak lagi bersusah payah membuang sampah ke tempat yang tidak sepatutnya dan masyarakat bisa memanfaatkan sampah yang ada untuk diolah menjadi beragam produk yang diusahakan oleh Bank Sampah.

Hasil ini menggambarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat dalam melakukan langkah inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang dan adanya transparansi atau terbukanya sistem penganggaran pengelolaan sampah, sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih baik dan apa yang dikerjakan dalam pengelolaan sampah diketahui masyarakat semisalnya perwakilan dari masyarakat yakni DPRD. Dengan demikian dari dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup telah dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah, sehingga pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dengan demikian dari seluruh indikator yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dikumpulkan pada satu tabel rekapitulasi untuk dapat ditarik satu kesimpulan atas penelitian yang dilaksanakan. Adapun distribusi data pada masing-masing indikator di atas dapat dilihat tabel berikut:



**Tabel V.9 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

No.	Pertanyaan	Tanggapan			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Inovasi minimal telah berjalan 2 tahun	36	7	7	50
2	Memiliki kebaruan dan keunikan	28	14	8	50
3	Melibatkan peran masyarakat serta stakeholder	29	15	6	50
4	Dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah	27	16	7	50
5	Memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat	26	19	5	50
Jumlah		146	71	33	250
Rata-rata		29	14	7	50
Persentase		58%	28%	14%	100%
Penilaian		Cukup Terlaksana			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021.

Berdasarkan data yang telah ditampilkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan inovasi dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berada pada kategori cukup terlaksana. Di mana sebagian besar responden mengatakan terlaksana sejumlah 29 orang, mengatakan cukup terlaksana 14 orang, dan mengatakan kurang terlaksana sebanyak 7 orang. Di mana hasil dari penelitian yang diperoleh sebesar 58%, sehingga dari teknik pengukuran yang telah ditetapkan sebelumnya dikatakan berada pada kategori cukup baik.

Inovasi pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kecamatan Tualang dari indikator yang ditetapkan telah terlaksana, namun belum berjalan

sebagaimana diharapkan. Di mana inovasi yang telah berjalan lebih dari 2 tahun masih sebatas memfasilitasi pembentukan bank sampah dan pemilahan sampah organik non organik, tetapi belum ada inovasi pengelolaan sampah yang ecobrick. Kemudian adanya kebaruan dan keunikan dalam pengelolaan sampah dengan cara menggandeng masyarakat dalam memilah sampah dan membuat bank sampah, namun masih terbatas di Kelurahan Perawang belum menyebar keseluruhan Kecamatan Tualang. Sementara dalam melibatkan peran masyarakat serta stakeholder telah dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam membentuk bank sampah. Sedangkan kegiatan pengelolaan sampah telah dibiayai oleh APBD dari Kabupaten Siak, namun dana yang disediakan masih terbatas sehingga untuk beragam pengelolaan sampah belum berjalan sebagaimana diharapkan. Memberi dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat, sehingga dalam pengelolaan sampah ini setidaknya telah berkurangnya kerusakan lingkungan hidup dan memberi manfaat secara ekonomis kepada masyarakat dalam memanfaatkan sampah menjadi produk bernilai jual.

Hasil ini memberikan penjelasan bahwa inovasi dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah dilaksanakan dengan melakukan inovasi yang telah berjalan lebih dari 2 tahun, adanya kebaruan dan keunikan dalam pengelolaan sampah dengan cara menggandeng masyarakat, melibatkan peran masyarakat serta stakeholder, dan kegiatan dibiayai oleh APBD dari Kabupaten Siak, kemudian memberi dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat.

## **2. Hambatan/kendala Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan persampahan, yaitu:

- Tingkat penyebaran penduduk di Kecamatan Tualang yang tidak merata, sehingga pengelolaan sampah menjadi kurang efektif. Di mana dari 9 desa/kelurahan yang berdampak dari inovasi pengelolaan sampah hanya 1 kelurahan yakni Kelurahan Perawang. Sementara untuk beberapa desa/kelurahan lainnya belum tersentuh sepenuhnya dalam inovasi pengelolaan sampah.
- Belum melembaganya keinginan dalam masyarakat untuk menjaga lingkungan, sehingga berbagai jenis inovasi yang telah dibentuk pemerintah belum berjalan maksimal seperti inovasi pembuatan Bank Sampah yang hanya berjalan di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, sementara di desa/kelurahan lainnya belum berjalan. Belum adanya pelaksanaan inovasi pengelolaan sampah yang mengadopsi kategori ecobrick, sehingga inovasi pengelolaan sampah masih sebatas pada Bank Sampah.
- Belum ada pola baku bagi pembinaan masyarakat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan dalam menyadarkan masyarakat mengenai persampahan baik dampak negatif maupun positifnya. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya masyarakat yang turut terlibat dalam pengelolaan

sampah, sehingga partisipasi masyarakat untuk mendukung inovasi pengelolaan sampah masih sangat sedikit jumlahnya.

- Pengelola sampah yang belum mencantumkan penyuluhan dalam programnya, sehingga program-program penyuluhan dalam pengelolaan persampahan belum berjalan di tengah-tengah masyarakat.
- Kekhawatiran pengelola bahwa inisiatif masyarakat tidak akan sesuai dengan konsep pengelolaan yang ada.
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengelola sampah di Kecamatan Tualang seperti masih sedikitnya jumlah tempat penampungan sampah sementara yang disediakan, alat pengangkutan sampah yang berjumlah hanya 2 unit mobil dump truck dan 1 mobil pickup.
- Belum tersedianya tempat penampungan sampah yang terpisah antara sampah organik dan non organik, sehingga pemilahan sampah di TPA memakan waktu.

Dengan demikian jelaslah bahwa terdapat beberapa hambatan dalam inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun hambatan tersebut dapat diringkas yakni tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata, partisipasi masyarakat yang belum berjalan dengan baik, pembinaan yang belum terprogram, penyuluhan yang belum berjalan, dan sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas, serta fasilitas penampungan sampah di lingkungan masyarakat yang masih terbatas.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan inovasi dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berada pada kategori cukup terlaksana. Hasil ini dijelaskan bahwa:

1. Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah dilaksanakan dengan melakukan inovasi yang telah berjalan lebih dari 2 tahun, adanya kebaruan dan keunikan dalam pengelolaan sampah dengan cara menggandeng masyarakat, melibatkan peran masyarakat serta stakeholder, dan kegiatan dibiayai oleh APBD dari Kabupaten Siak, kemudian memberi dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan demikian inovasi pengelolaan sampah berada pada kategori cukup terlaksana.
2. Terdapat beberapa hambatan dalam inovasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tualang yakni tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata, partisipasi masyarakat yang belum berjalan dengan baik, pembinaan yang belum terprogram, penyuluhan yang belum berjalan, dan sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas, serta fasilitas penampungan sampah di lingkungan masyarakat yang masih terbatas.

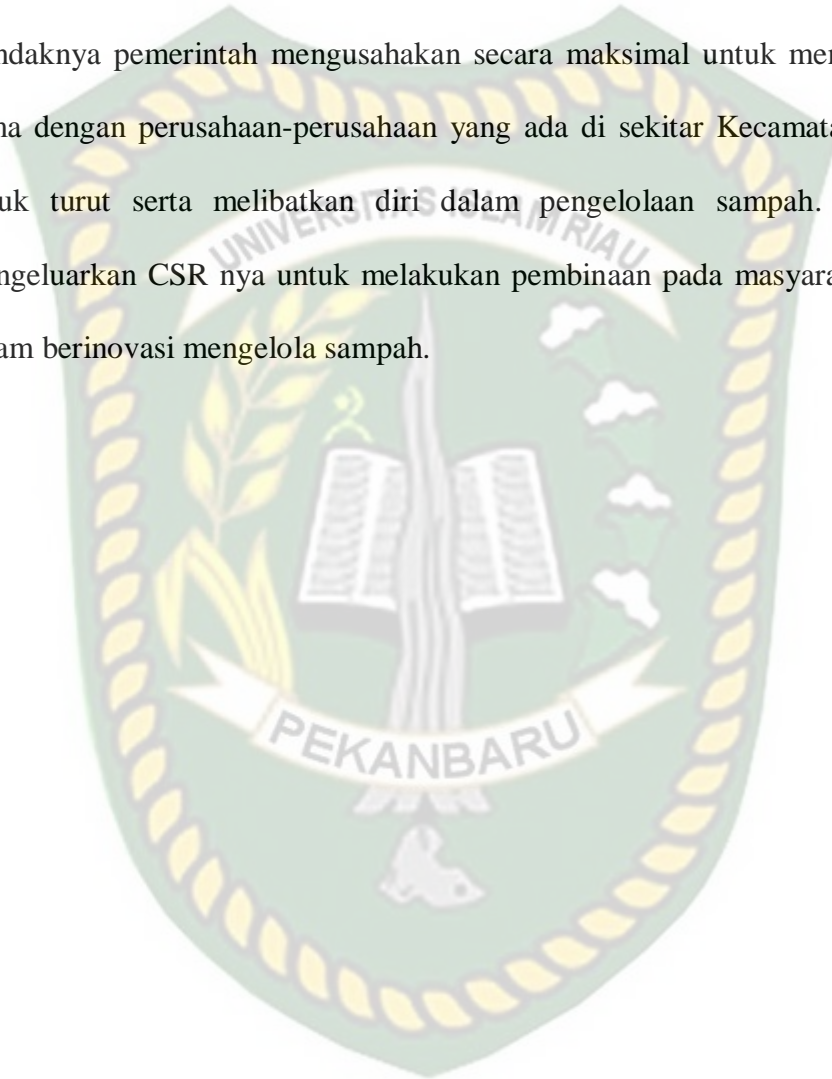
## B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah hendaknya mengalokasikan anggaran untuk inovasi pengelolaan sampah yang memadai, sehingga Dinas Lingkungan Hidup bisa menjalankan berbagai program inovasi dalam mengelola sampah untuk menuju siak hijau.
2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup hendaknya membuat program inovasi pengelolaan sampah yang berkesinambungan dan terukur, sehingga berbagai inovasi pengelolaan sampah dapat dijalankan di seluruh wilayah Kabupaten Siak. Inovasi pengelolaan sampah yang dilakukan mampu mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan ekosistemnya akibat sampah yang tidak terkelola. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup hendaknya lebih aktif dalam mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk memanfaatkan sampah menjadi bermanfaat dan bernilai jual.
3. Bagi UPTD Persampahan di Kecamatan Tualang hendaknya mengajukan atau usulan untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dalam menjangkau pengelolaan sampah di seluruh kawasan Kecamatan Tualang. Kemudian hendaknya meningkatkan partisipasi masyarakat setempat dalam turut serta menginovasi pengelolaan sampah yang ada.
4. Hendak masyarakat setempat melibatkan diri lebih aktif lagi dalam mengelola sampah dan menjadikan sampah sebagai salah satu sumber bahan baku untuk

menciptakan beragam produk yang bernilai jual. Selain itu masyarakat juga hendaknya berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan memilah jenis sampah sesuai kategorinya yakni organik dan non organik.

5. Hendaknya pemerintah mengusahakan secara maksimal untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kecamatan Tualang untuk turut serta melibatkan diri dalam pengelolaan sampah. Kemudian mengeluarkan CSR nya untuk melakukan pembinaan pada masyarakat sekitar dalam berinovasi mengelola sampah.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Awang, Azam & wijaya Mendara, 2012. *Ekologi Pemerintahan*, Pekanbaru,Alaf Riau.
- Agus, 2014. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*.Gadjah Mada University.
- Fitri Yani, Herita. 2018.*Buku Pedoman Penulis Usulan Penelitian Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*, Pekanbaru. Badan Penerbit Fisipol UIR
- Gede. Mede. (2015). *Inovasi Daerah:Refleksi dan Pengaturan Inovasi Daerah di Indonesia*. Vol.4, No.4 : 680-687
- Herujito. Yayat. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : PT. Gramedia
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan publik (berbasis dynamic policy analysis)*. Yogyakarta,Gava Media.
- Kansil, CST, dan Christine, 2003. *System Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kaho Joseph Riwu, 1997.*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; identifikas beberpa factor yang mempengaruhi penyelenggaraannya*. Jakarta,Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami ilmu pemerintahan suatu kajian, teori dan konsep pengembangannya*, jakarta, PT Raja Grafindo persada.
- LAN. 2016. *Penyusunan Model Pengukuran Indexs Inovasi Pemerintah Daerah*. Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kedeputusan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara : Jakarta
- Munawir, 2004. *Analisa Laporan Keuangan*.Jakarta,Salemba Empat.
- Munaf, Yusri.2016. *Hukum Adminstrasi Negara Ilmu Sosial dan Politik*. Pekanbaru,Universitas Islam Riau.
- Ndraha, Talizuduhu.2003.*Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*.Jakarta,Rineka Cipta.
- Ndraha, Talizuduhu. 1997. *metodologi ilmu pemerintahan*, rineka cipta. Jakarta.
- Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo.



- Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Publik Negara Berkembang*. Elex Media Komputindo
- Riyadi dan Deddy, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta. Gramedia Fokus Utama
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung, Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Refika Aditama.
- Suardi, Moh. 2015. *Belajar dan Pembelajaran*. Deepublish.
- Sumaryadi, Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Sunarno, Siswanto, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Wahab, Abdul solihin, 2005. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Surahma Asti Mulasari. Adi Heru Husodo. Neong Muhadjir. (2014). *Kebijakan Pemerintahan Dalam Pengolahan Sampah Dosmetik*. Vol.8 No.8
- Sururi. Ahmad. (2016). *Inovasi Kebijakan Publik*. Jurnal Sawala Vol. 4, No. 3 (September-Desember).

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 9 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah